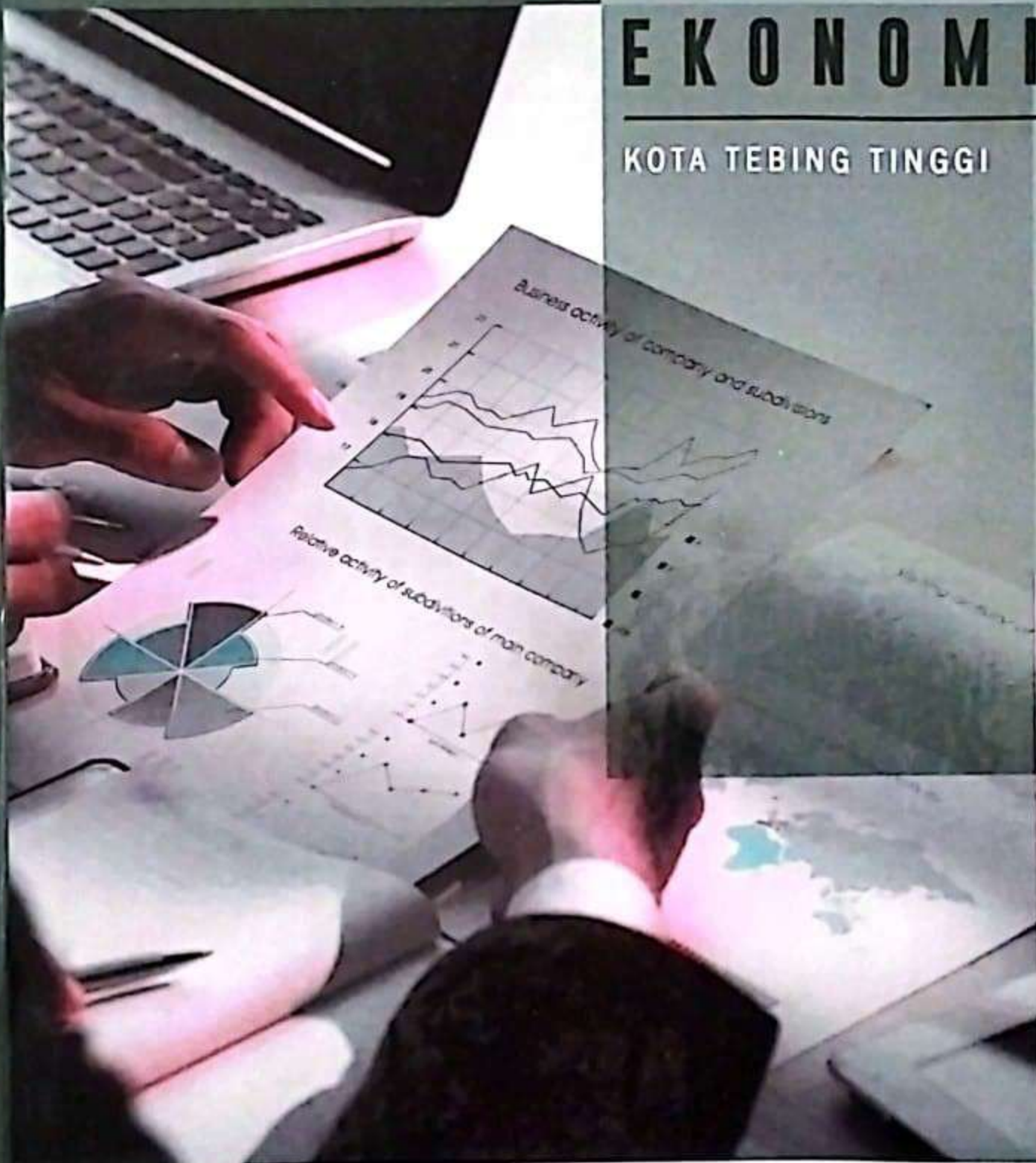




ANALISIS EKONOMI MAKRO

KOTA TEBING TINGGI



AGAI MASALAH YANG...
M PEMBANGUNAN. SEMENTARA...
BANGUNAN, DATA DAPAT DIJADI...
UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN...
SUATU PROGRAM PEMBANGUNAN...
JASI, DATA DAPAT MEMERIKSA...
MELAKUKAN PENILAIAN...
BERIKAN HASIL SEPERTI YANG...
M UNTUK MENGHASILKAN...

LAPORAN AKHIR



ANALISIS EKONOMI MAKRO TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Akhir yang berjudul "*Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi*" ini dapat kami selesaikan dengan baik. Kajian ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi dengan Konsultan.

Laporan ini berisi mengenai pertumbuhan ekonomi serta proyeksi estimate pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi, inflasi, nilai ICOR dari investasi, gini ratio dan elastisitas tenaga kerja. Perlu diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 berdasarkan data PDRB ADHK 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi memiliki *pattern* (pola) tumbuh positif yang tidak berbeda jauh dengan Provinsi Sumatera Utara. Sektor atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor dengan kontribusi terbesar.

Tim Konsultan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dari mulai awal sampai dengan terselesaikannya Laporan Akhir ini. Semoga laporan ini dapat menjawab kebutuhan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi dan dapat digunakan sebagai data dan informasi, selanjutnya berguna untuk pengambilan kebijakan dan keputusan pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi.

Medan, 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Sasaran.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep dan Defenisi PDRB.....	4
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto.....	4
2.1.2 Turunan Produk Domesetik Regional Bruto	6
2.1.3 Metode Perhitungan.....	7
2.1.4 Perhitungan PDRB menurut Lapangan Usaha.....	9
2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi	10
2.3 Inflasi	11
2.3.1 Dampak Inflasi.....	12
2.3.2 Sumber-Sumber Penyebab Inflasi	13
2.4 ICOR.....	15
2.5 Investasi.....	17
2.6 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	18
2.7 Pengertian Output.....	21

2.8	Pengertian Nilai Tambah	22
2.9	Ketenagakerjaan	22
2.9.1	Tingkat Pengangguran.....	26
2.9.2	Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)	27
2.9.3	Kemiskinan	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Kajian Literatur.....	31
3.2	Ekonomi Daerah.....	31
3.3	Keuangan Daerah	37
3.4	Metode Pendekatan	40
3.5	Menganalisis Kondisi Ekonomi Tebing Tinggi 2015-2020	41
3.6	Proyeksi Indikator Ekonomi Kota Tebing Tinggi	41
3.7	Menyusun Perubahan Asumsi Ekonomi Makro tahun 2015-2020	42
3.8	Menyusun Skema Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi.....	42

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1	Letak Geografis	43
4.2	Wilayah Administrasi dan Pemerintahan	44
4.3	Kondisi Geografi Daerah	46
4.4	Kondisi Sosial.....	47
4.5	Kondisi Ekonomi.....	48

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

5.1	RPJMD Kota Tebing Tinggi.....	52
5.2	Renstra Organisasi Perangkat Daerah	53

BAB VI OUT LOOK EKONOMI DAERAH

6.1	Ketenagakerjaan.....	57
6.1.1	Penduduk Usia Kerja	59
6.1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	59
6.1.3	Lapangan Pekerjaan	60

6.1.4	Status Pekerjaan	63
6.2	Konsumsi Rumah Tangga	64
6.3	Struktur Ekonomi (PDRB) Daerah Kota Tebing Tinggi	66
6.3.1	Perkembangan dan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	67
6.4	Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	68
6.5	Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran.....	86
6.6	Pertumbuhan Ekonomi	90
6.7	PDRB Perkapita	93
6.8	Kemiskinan	95
6.9	Indeks Pembangunan Manusia.....	99
BAB VII HASIL PROYEKSI DAN ANALISIS		
7.1	Kondisi Ekonomi Kota Tebing Tinggi	100
7.1.1	Perbandingan PDRB Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi	100
7.1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi	101
7.1.3	Proyeksi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi 2020-2025 Trend Normal Per Sektor Lapangan Usaha.....	102
7.1.4	Proyeksi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi 2020-2025 Akibat Virus Covid-19	104
7.2	Tingkat Inflasi	105
7.3	Perkiraan Investasi Daerah	106
7.3.1	Koefisien ICOR Total	107
7.4	Kesenjangan Distribusi Pendapatan.....	109
7.4.1	Pengeluaran Rumah Tangga.....	111
7.4.2	Kesenjangan Distribusi Pendapatan.....	112
7.5	Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Sektor Kota Tebing Tinggi Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	114
7.6	Ketenagakerjaan.....	115

7.7	Perbandingan Analisis Kinerja Ekonomi Makro Dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2017-2022.....	118
7.8	Perkiraan Investasi Daerah	119
7.8.1	Koefisien ICOR Total	121
7.9	Analisis Kinerja Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi Terhadap Pandemi Covid 19.....	123
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN		
8.1	Kesimpulan.....	126
8.2	Saran.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Tebing Tinggi	45
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	46
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk dan Persentase Berumur 15 Tahun Keatas di Kota Tebing Tinggi menurut Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	58
Tabel 6.2	TPAK dan TPT di Kota Tebing Tinggi Tahun 2008 – 2019 (Persen)	60
Tabel 6.3	Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang bekerja di Kota Tebing Tinggi menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2014 - 2019.....	62
Tabel 6.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019.....	64

Tabel 6.5	Rata – rata Pengeluaran Perkapita sebulan dan persentasenya menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018 - 2019 ..	65
Tabel 6.6	Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019..	66
Tabel 6.7	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 - 2019.....	67
Tabel 6.8	Kontribusi Kategori Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 - 2017.....	68
Tabel 6.9	Kontribusi Kategori Pertambangan dan Pengalihan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019.....	69
Tabel 6.10	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019	70
Tabel 6.11	Kontribusi Kategori Industri Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019.....	71
Tabel 6.12	Kontribusi Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019.....	73
Tabel 6.13	Kontribusi Kategori Konstruksi terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019.....	73
Tabel 6.14	Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015- 2019.....	75
Tabel 6.15	Kontribusi Kategori Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019	76
Tabel 6.16	Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019 .	77
Tabel 6.17	Kontribusi Kategori Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019	78

Tabel 6.18	Kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019	79
Tabel 6.19	Kontribusi Kategori Real Estat terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019	80
Tabel 6.20	Kontribusi Kategori Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015- 2019	81
Tabel 6.21	Kontribusi Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019	82
Tabel 6.22	Kontribusi Kategori Jasa Pendidikan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019	83
Tabel 6.23	Kontribusi Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019	84
Tabel 6.24	Kontribusi Kategori Jasa Lainnya terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019	85
Tabel 6.25	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019	86
Tabel 6.26	PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 – 2019 (Juta Rupiah)	88
Tabel 6.27	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2012 - 2019	89
Tabel 6.28	Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 - 2013 .	91
Tabel 6.29	PDRB Perkapita Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 - 2019	94
Tabel 6.30	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi	96
Tabel 6.31	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 - 2019	97
Tabel 6.32	Komponen IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	

	Tahun 2018 - 2019.....	98
Tabel 7.1	Perkembangan Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha 2016-2019 (Juta Rupiah)	102
Tabel 7.2	Proyeksi Perkembangan Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha 2016-2019 (Juta Rupiah)	103
Tabel 7.3	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi 2020-2024.....	105
Tabel 7.4	Tingkat Inflasi Kota Tebing Tinggi	106
Tabel 7.5	Perkembangan Nilai Investasi Kota Tebing Tinggi 2015-2019.....	107
Tabel 7.6	Perkiraan Investasi Daerah (PMTB) Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah).....	109
Tabel 7.7	Koefisien ICOR Kota Tebing Tinggi 2015-2020.....	110
Tabel 7.8	Garis kemiskinan Kota Tebing Tinggi 2015-2020.....	111
Tabel 7.9	Pola Konsumsi Kota Tebing Tinggi 2015-2020	115
Tabel 7.10	Sektor Basis Yang Dapat Dikembangkan Kota Tebing Tinggi	116
Tabel 7.11	Jumlah Angkatan Kerja Per Sektor.....	117
Tabel 7.12	Perbandingan Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka.....	117
Tabel 7.13	Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral Kota Tebing Tinggi	119
Tabel 7.14	Perkembangan Nilai Investasi Kota Tebing Tinggi 2015-2019.....	120
Tabel 7.15	Perkembangan Nilai Daerah (PMTB) Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah).....	121
Tabel 7.16	Koefisien ICOR Kota Tebing Tinggi 2015-2020.....	122

ANALISIS EKONOMI MAKRO TAHUN 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Partisipasi Angkatan Kerja	24
------------	--	----

Gambar 6.1	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016 - 2019	69
Gambar 6.2	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Tahun 2016 - 2019	70
Gambar 6.3	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun 2016 - 2019.....	71
Gambar 6.4	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2016 - 2019	72
Gambar 6.5	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2016 - 2019.....	73
Gambar 6.6	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi Tahun 2016 - 2019.....	74
Gambar 6.7	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2016 - 2019.....	75
Gambar 6.8	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Tahun 2015 - 2019.....	76
Gambar 6.9	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2015 - 2019.....	77
Gambar 6.10	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Tahun 2016 - 2019.....	78
Gambar 6.11	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2016 - 2019.....	79
Gambar 6.12	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estat Tahun 2016 - 2019.....	80
Gambar 6.13	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan	

Tahun 2016 - 2019.....	81
Gambar 6.14 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Tahun 2016 - 2019.....	82
Gambar 6.15 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Tahun 2016 - 2019.....	83
Gambar 6.16 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tahun 2016 - 2019	84
Gambar 6.17 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya Tahun 2016 - 2019.....	85
Gambar 6.18 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran.....	87
Gambar 6.19 Distribusi PDRB ADHK Menurut Pengeluaran.....	88
Gambar 6.20 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2019	92
Gambar 6.21 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2019	93
Gambar 6.22 Pertumbuhan PDRB Per Kapita 2015-2019.....	94
Gambar 7.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi dan Sumatera Utara	100
Gambar 7.2 Perbandingan Share PDRB Kota Tebing Tinggi dan Sumatera Utara	101
Gambar 7.3 Trend Proyeksi Nilai PDRB 2020-2024.....	103
Gambar 7.4 Regresi Pertumbuhan Ekonomi 2020-2024.....	105
Gambar 7.5 Nilai Gini Ratio Kota Tebing Tinggi 2015-2019.....	112
Gambar 7.6 Kriteria Bank Dunia (Relative Inequality) Kota Tebing Tinggi 2015-2019.....	113
Gambar 7.7 Perkembangan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sudut pandang ilmu ekonomi, sebuah wilayah akan berkembang sesuai dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi (economic resources) yang tersedia dan digunakan. Sumber daya tersebut adalah sumber daya tenaga kerja (labour) dan sumber daya modal atau kapital (capital). Kedua sumber daya tersebut disebut sebagai faktor-faktor produksi (factors of production). Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan pencapaian indikator – indikator ekonomi secara makro.

Perkembangan perekonomian di Kota Tebing Tinggi itu sendiri diharapkan berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus diiringi dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Fokus pemerintah saat ini berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Era otonomi daerah telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya. Dengan kata lain, daerah diberi wewenang untuk mengelola sendiri keuangannya sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan demi tercapainya kemakmuran penduduk di wilayahnya, dengan mempertimbangkan segenap potensi, sumber daya serta faktor-faktor lainnya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, ketersediaan data atau indikator statistik regional mutlak diperlukan. Data digunakan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam proses pembangunan daerah. Pada tahap perencanaan, data merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berbagai skala prioritas dan memetakan berbagai persoalan yang harus diselesaikan melalui program pembangunan.

Sementara dalam tahap pelaksanaan pembangunan, data dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dari suatu program pembangunan. Sedangkan pada tahap evaluasi, data dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk melakukan penilaian apakah suatu program telah memberikan hasil seperti yang telah diinginkan atau belum. Untuk menghasilkan perencanaan regional yang baik, bagaimanapun memerlukan data yang baik dan sesuai. Bahkan kualitas dari data dasar akan sangat berpengaruh pada kualitas perencanaan regional, data yang buruk akan menghasilkan perencanaan yang buruk pula (garbage in, garbage out). Oleh karena itu penyediaan berbagai data dan indikator untuk kebutuhan perencanaan merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam menyusun perencanaan regional.

Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu langkah konkret Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menyusun Data yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi itu sendiri.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi ini dimaksudkan untuk menyusun buku Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi yang merupakan gambaran atau deskripsi kondisi

perekonomian kota yang memuat ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat konsumsi masyarakat, inflasi, kemiskinan, pendapatan per kapita, dan tingkat pengangguran.

1.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi ini dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data dan informasi tentang ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, konsumsi masyarakat, dan pendapatan per kapita;
- Menganalisis kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan pendapatan per kapita;
- Menganalisis efektivitas kebijakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemerintahan dalam konteks perekonomian kota;
- Memberikan rekomendasi pola penyusunan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang tepat untuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta tingkat inflasi yang terkontrol; dan
- Proyeksi dan perkiraan perekonomian daerah Kota Tebing Tinggi;

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep dan Definisi PDRB

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini dengan mendasari pada PDRB ADHK 2010 dikelompokkan menjadi lapangan usaha/sektor yakni:

- Pertanian, kehutanan dan perikanan

- Pertambangan dan penggalian
- Industri pengolahan
- Pengadaan listrik dan gas
- Pengadaan air
- Konstruksi
- Perdagangan besar dan eceran
- Reparasi mobil dan sepeda motor
- Transportasi dan pergudangan
- Penyediaan akomodasi dan makan minum
- Informasi dan komunikasi
- Jasa keuangan
- Real estat
- Jasa perusahaan
- Administrasi pemerintahan
- Pertahanan dan jaminan sosial wajib
- Jasa pendidikan
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- Jasa lainnya

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Komponen permintaan akhir meliputi:

- a. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu.
 - Pengeluaran konsumsi rumah tangga
 - Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
 - Pengeluaran konsumsi pemerintah

- Pembentukan modal tetap domestik bruto
- Perubahan inventori/stok dan ekspor neto

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu. Komponen balas jasa. Faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor tersebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

2.1.2 Turunan Produk Domestik Regional Bruto

Turunan PDRB atas harga berlaku terbagi atas 3 (tiga) yakni PDRB atas harga berlaku, PDRN atas harga berlaku, dan PDRB atas dasar biaya faktor.

a. PDRB atas Harga Berlaku

PDRB atas harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di daerah/wilayah termasuk penyusutan dan pajak tak langsung netto. Sedangkan menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.

Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku.

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas Harga Berlaku

PDRB atas dasar biaya faktor adalah PDRB atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRB atas dasar biaya faktor disebut sebagai Pendapatan Regional.

c. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Biaya Faktor

PDRB atas dasar biaya faktor adalah PDRB atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRB atas dasar biaya faktor disebut sebagai Pendapatan Regional.

d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (riil).

2.1.3 Metode Perhitungan

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda

- **Revaluasi**

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2010. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. Dalam praktik, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang tersedia juga

tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya antara dengan output pada tahun dasar.

- **Ekstrapolasi**

Menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2010 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2010. Dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar teori pertumbuhan ekonomi 2010, maka diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan

- **Deflasi**

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

- **Deflasi Berganda**

Dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan

diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupan komoditasnya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

2.1.4 Perhitungan PDRB menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2015, BPS melakukan perubahan tahun dasar untuk perhitungan PDRB dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut (BPS):

1. Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
4. Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;

5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI);
6. Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut

Adapun sektor utama PDRB harga konstan 2010 yakni: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya.

2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bisa terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayah secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa melihat apakah pertumbuhan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk secara merata atau tidak.

Perkembangan selanjutnya, para pengambil kebijakan pembangunan daerah mulai memperhitungkan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, sehingga tingkat pemerataan mulai menjadi suatu indikator bagi kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah "proses" berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100$$

keterangan:

PE = Pertumbuhan ekonomi

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke t

PDRB_(t-1) = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke (t-1)

2.3 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu

atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus-menerus, bukanlah merupakan inflasi.

inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat. Naiknya biaya produksi yang meningkat juga dapat menyebabkan inflasi yang biasa disebut dengan *cost push inflation* dan inflasi yang berasal dari naiknya harga impor secara keseluruhan yang disebut sebagai *imported inflation*. Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi.

2.3.1 Dampak Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan pendapatan nasional masing-masing disebut dengan *efficiency* dan *output effects*.

- **Efek terhadap Pendapatan (*Equity Effect*)**

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas akan memiliki kerugian karena adanya inflasi. Sebaliknya, pihak-

pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang di mana nilainya naik dengan persentase lebih besar dari pada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat.

- **Efek terhadap Efisiensi (*Efficiency Effect*)**

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan produksi barang tertentu.

- **Efek terhadap Output (*Output Effect*)**

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (*hyper inflation*) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan

output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output.

2.3.2 Sumber-Sumber Penyebab Inflasi

Adapun sumber-sumber penyebab inflasi *demand pull inflation* dan *supply side inflation*.

- ***Demand Pull Inflation***

Demand pull inflation adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh adanya gangguan (shock) pada sisi permintaan barang dan jasa. Kenaikan permintaan barang yang tidak seimbang dengan kenaikan penawaran akan mendorong harga naik sehingga terjadi inflasi. Dalam *demand pull inflation*, kenaikan harga barang akhir (output) mendahului kenaikan harga barang input dan harga faktor produksi (misalnya tingkat upah).

- ***Supply Side Inflation***

Berbeda dengan *demand pull inflation*, *cost push inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya gangguan (shock) dari sisi penawaran barang dan jasa atau yang biasa juga disebut dengan *supply shock inflation*, biasanya ditandai dengan kenaikan harga yang disertai oleh turunnya produksi atau output. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan penawaran total (aggregate supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kekakuan struktural sendiri terjadi karena anggapan bahwa sumber daya ekonomi tidak dapat dengan cepat diubah pemanfaatannya dan juga bahwa upah dan tingkat harga mudah naik tapi sukar untuk turun kembali (rigidity of price). Dengan asumsi ini, bila terjadi perubahan pola permintaan dan biaya, maka mobilitas sumber daya dari sektor yang kurang berkembang ke sektor yang berkembang akan sulit sekali, sehingga suatu sektor yang kurang berkembang akan

terjadi *idle capacity*, sedangkan sektor yang berkembang akan kekurangan sumber daya. Dan hal ini justru mendorong meningkatnya harga pada sektor yang berkembang. Kekakuan di sektor yang lemah dan kenaikan harga di sektor yang berkembang menyebabkan inflasi.

- ***Demand Supply Inflation***

Peningkatan permintaan total (aggregate demand) menyebabkan kenaikan harga yang selanjutnya diikuti oleh penurunan penawaran total (aggregate supply) sehingga menyebabkan kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Interaksi antara bertambahnya permintaan total dan berkurangnya penawaran total yang mendorong kenaikan harga ini merupakan akibat adanya ekspektasi bahwa tingkat harga dan tingkat upah akan meningkat atau dapat juga karena adanya inersia dari inflasi di masa lalu

2.4 ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Pengkajian mengenai ICOR menjadi sangat menarik karena ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai.

Teori Harrod – Domar mempunyai beberapa asumsi:

- a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan sepenuhnya.

- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ini berarti dalam analisis dianggap tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor luar negeri.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah merupakan fraksi tertentu dari besarnya pendapatan nasional. Ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan masyarakat untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal – output (capital output ratio = COR) dan rasio pertambahan modal-output (incremental capital output ratio = ICOR).

Pada dasarnya teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep yaitu:

- Rasio Modal-Output atau Capital Output Ratio (COR) atau sering disebut sebagai Average Capital Output Ratio (ACOR), yaitu perbandingan antara modal yang digunakan dengan output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. COR atau ACOR ini bersifat statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan perbandingan modal dan output.
- Rasio Modal-Output Marginal atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan modal (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Konsep ICOR ini lebih bersifat dinamis karena menunjukkan perubahan/penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan modal.

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

Keterangan:

ΔK = Investasi, atau penambahan barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = Pertambahan output

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok kapital, melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y}$$

keterangan:

I = Investasi

ΔY = perubahan output

Pada kenyataannya pertambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

2.5 Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi diharapkan kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Sehingga dengan peningkatan output akan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara.

Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian pentingnya informasi investasi. Berdasarkan buku panduan yang diterbitkan oleh *United Nations* (PBB) mengenai penyusunan neraca nasional yang disebut *System of National Accounts* (SNA), besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) plus perubahan inventori/stok. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal, seperti: bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Investasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. Sedangkan investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. Adapun penekanan investasi di sini lebih kepada investasi yang berupa fisik.

Konsep investasi dalam penghitungan ICOR menggunakan konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi yang dimaksud di sini adalah *fixed capitalformation*/pembentukan barang modal tetap yang terdiri dari: tanah gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan barang modal lainnya. Sementara itu nilai yang diperhitungkan mencakup:

- Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,
- Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,

- Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,
- Penjualan barang modal bekas.

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi penjualan barang modal bekas.

2.6 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Secara konseptual, PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran untuk pengadaan barang modal yang meliputi: pembuatan sendiri, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, setelah dikurangi barang modal yang dijual atau yang diberikan kepada pihak lain. Barang modal adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih (disebut sebagai barang modal tetap; sedangkan bruto mencerminkan bahwa penghitungan PMTB belum dikurangi dengan penyusutan barang modal). Secara lebih rinci PMTB pada dasarnya meliputi:

- a. Pembentukan modal berupa bangunan, mesin, angkutan dan perlengkapannya yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.
- b. Perbaikan besar, maksudnya biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan barang modal untuk meningkatkan mutu barang modal tersebut atau menambah umur pakai barang modal.
- c. Biaya untuk pengembangan atau perbaikan lahan, penanaman kembali hutan, perluasan daerah pertambangan, penanaman dan peremajaan tanaman keras.
- d. Pembelian ternak untuk pembiakan, pemerahan susu, atau sebagai alat angkutan, tetapi tidak termasuk ternak potong untuk konsumsi.
- e. Margin perdagangan dan ongkos-ongkos yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah, hak paten, hak cipta, dan sebagainya

Adapun PMTB yang dapat diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

- PMTB menurut jenis barang modal
- PMTB menurut lapangan usaha/sector
- PMTB menurut institusi.

PMTB menurut jenis barang modal dapat dibedakan atas:

1. Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya.
2. Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan restoran.
3. Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan sebagainya. yang dimaksud dalam PMTB adalah barang-barang modal yang digunakan untuk keperluan pabrik, kantor maupun usaha rumah tangga, tetapi tidak termasuk yang digunakan untuk konsumsi (durable goods).
4. Barang modal lainnya seperti: perluasan hutan; pengembangan/perluasan lahan; penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; dan sebagainya.

PMTB menurut lapangan usaha/sector adalah:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- Pertambangan dan Penggalian;
- Industri Pengolahan;
- Pengadaan Listrik, Gas;
- Pengadaan Air;

- Konstruksi;
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan;
- Real Estate;
- Jasa Perusahaan;
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- Jasa Pendidikan;
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- Jasa lainnya.

PMTB menurut institusi dibedakan atas tiga kelompok berikut:

1. Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk membangun gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah sebagai *administration*, termasuk juga bila pemerintah mengeluarkan biaya untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan irigasi, dan sebagainya.
2. Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk pengeluaran biaya oleh kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial dan non finansial.
3. Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik sendiri secara besar-besaran dianggap sebagai bagian dari pembentukan modal. Hal ini sesuai

dengan keharusan mengimputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik milik sendiri maupun rumah dinas.

2.7 Pengertian Output

Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata lain, output merupakan “keluaran” atau hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan.

Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik dalam suatu periode tertentu. Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam proses. Output yang dimaksud adalah:

- Barang-barang yang dihasilkan.
- Tenaga listrik yang dijual.
- Selisih nilai stok setengah jadi.

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.

Dalam pengertian ICOR, output adalah tambahan (flow) produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan faktor-faktor produksi. Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha. Seluruh output yang dihasilkan

dinilai atas dasar harga produsen. Output juga merupakan nilai perolehan produsen atas kegiatan ekonomi produksinya.

2.8 Pengertian Nilai Tambah

Konsep Nilai Tambah berkaitan erat dengan konsep penghitungan output. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi.

Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara (bukan barang modal).

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan data penyusutan barang modal dan pajak tak langsung, maka pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk penghitungan ICOR ini.

2.9 Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan. Keberadaan mereka dapat menjadi faktor yang mendukung atau menghambat pembangunan, tergantung kualitasnya. Kualitas penduduk dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

- **Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio)**

Angka beban tanggungan menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk yang dianggap tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun atau 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15 tahun sampai 64 tahun). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{\text{Jumlah Penduduk} + \text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Angka beban tanggungan masih merupakan indikator yang sangat sederhana karena produktivitas penduduk hanya dilihat dari usia, bukan dari kegiatan produktifnya (angkatan kerja).

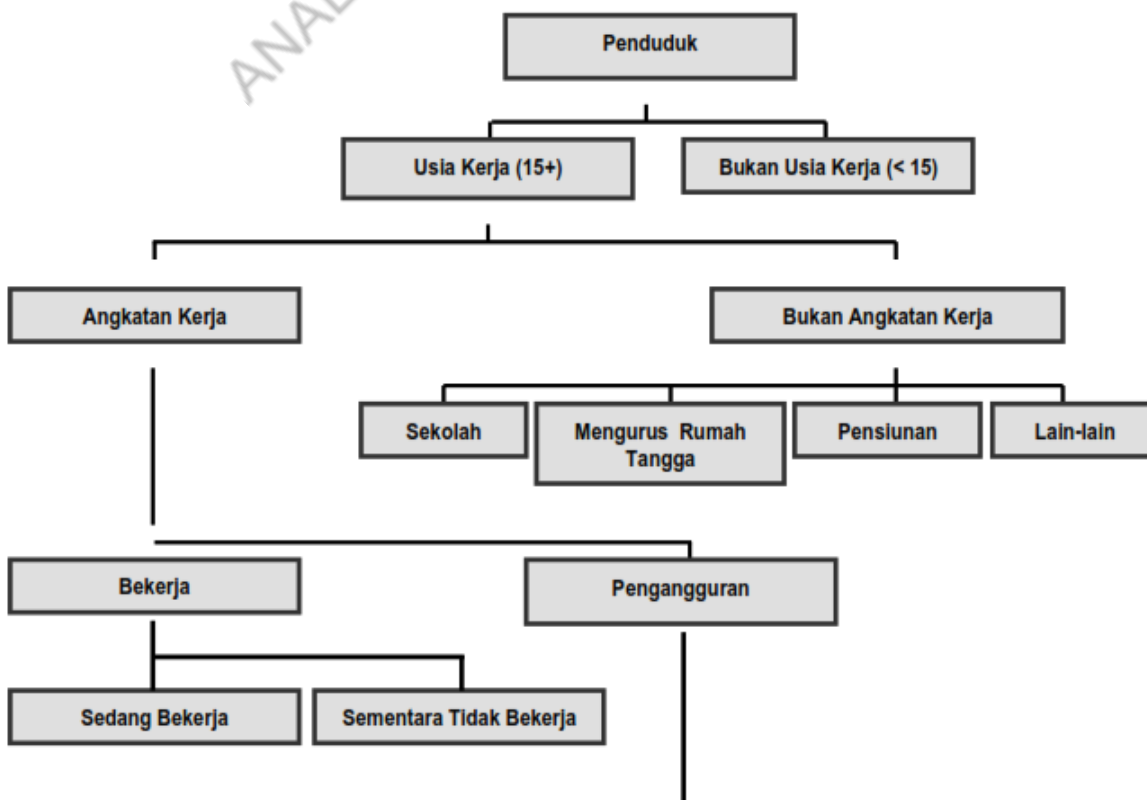
Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS atas saran dari *The International Labor Organization* (ILO), penduduk dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, yang digolongkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti cacat mental atau sebab lain sehingga tidak produktif.

Penduduk bekerja adalah penduduk yang memiliki kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka

sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. Pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Beberapa konsep pokok ketenagakerjaan adalah:

- Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapat pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu di mana seminggu yang lalu masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Jadi dalam kategori mencari pekerjaan juga dimasukkan mereka yang sedang memasukkan lamaran.
- Penghasilan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus dan hasil usaha berupa sewa, bunga dan keuntungan, baik berupa uang atau natura/barang.
- Hari kerja adalah hari di mana seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 jam terus menerus.
- Jam kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja.



Gambar 2.1 Bagan Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah atau wilayah. Selain itu, TPAK juga digunakan untuk menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja, (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Kesempatan Kerja diukur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja minimal 1 jam secara berturut-turut ataupun mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja di periode pencacahan terhadap total angkatan kerja.

$$\text{TKK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

TKK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu daerah atau wilayah. Untuk keperluan analisis lebih lanjut, dapat dihitung laju pertumbuhan kesempatan kerja (rKK), yaitu perbandingan antara selisih jumlah

kesempatan kerja dalam 2 (dua) periode waktu terhadap jumlah kesempatan kerja pada periode waktu awal, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk menyajikan laju pertumbuhan penduduk yang bekerja.

$$r_{KK} = \frac{B_t - B_{t-1}}{B_{t-1}} \times 100\%$$

keterangan:

B_t = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t

B_{t-1} = Jumlah penduduk yang bekerja tahun $t-1$

2.9.1 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan salah satu target prioritas pembangunan yang perlu diturunkan. Tingkat pengangguran diindikasikan dengan beberapa ukuran, yaitu:

- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya dilihat jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. Dengan kata lain, laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan peningkatan laju

pertumbuhan pengangguran, demikian pula berlaku sebaliknya. Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan kedua variabel tersebut dijelaskan oleh elastisitas kesempatan kerja yang dirumuskan sebagai berikut:

$$E_{kk} = \frac{r_{KK}}{r_{PDRB}}$$

Keterangan:

E_{KK} = Elastisitas kesempatan kerja

r_{KK} = Laju pertumbuhan kesempatan kerja

r_{PDRB} = Laju pertumbuhan ekonomi

Semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

2.9.2 Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kemampuan tenaga kerja dalam penciptaan nilai tambah. Pada kajian ini, produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan nilai tambah (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja yang terlibat pada setiap sektor. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja yang dimaksud di sini merupakan produktivitas selama satu tahun.

$$PTK_t = \frac{PDRB_i}{TK_i}$$

Keterangan:

PTK_i = Produktivitas tenaga kerja sektor ke-i

PDRB_i = PDRB sektor ke-i

TK_i = Jumlah tenaga kerja sektor ke-i

Laju pertumbuhan produktivitas menunjukkan perkembangan produktivitas pada kurun waktu tertentu.

2.10 Kemiskinan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kegiatan perekonomian yang bermuara pada orientasi pemerataan akan mengurangi masalah kemiskinan.

Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai *"inability of the individual to meet basic needs"* yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah *"the failure to have certain minimum capabilities"*. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold).

Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan minimum non-makanan yang mendasar, seperti perumahan, pakaian, kesehatan,

pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya. Biaya untuk membayar 2.100 kilo kalori per kapita per hari disebut sebagai Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan biaya untuk membayar kebutuhan minimum non makanan mendasar disebut sebagai Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Individu dengan pengeluaran lebih rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan indikator kemiskinan yang sering digunakan dan biasa disebut *Head Count Index* (HCI).

Kemiskinan juga identik dengan ketimpangan wilayah, indeks kesenjangan antar wilayah disebut dengan Indeks Williamson, Indeks tersebut pada dasarnya membandingkan antar besaran ekonomi wilayah dengan besaran rata-rata di wilayah yang lebih luas (wilayah induk). Adapun model yang digunakan untuk menyusun indeks tersebut adalah sebagai berikut:

$$WI = \frac{1}{Y} \sqrt{\sum [(Y_i - Y) \cdot (\frac{f_i}{n})]}$$

Keterangan:

WI : Nilai Indeks Williamson dari variabel yang dimasukkan.

Y_i : Nilai dari variabel yang dimasukkan masing-masing daerah i

Y : Nilai dari variabel yang dimasukkan untuk cakupan wilayah yang membawahi daerah i.

f_i : Jumlah penduduk masing-masing daerah i

n : jumlah penduduk keseluruhan wilayah yang membawahi daerah i.

Dari indeks tersebut, maka dapat diketahui bagaimana posisi satu wilayah, relatif terhadap wilayah induknya. Semakin tinggi angka WI maka tingkat kesenjangan semakin tinggi. Selain itu juga analisis yang dapat menghitung kesenjangan adalah dengan menggunakan indeks penduduk, indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan:

P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke- i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran pada kelas pengeluaran ke- i

k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Rasio Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".



ANALISIS EKONOMI MAKRO TAHUN 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kajian Literatur

Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi (economic growth), stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Meskipun ekonomi makro merupakan bidang pembelajaran yang luas, ada dua area penelitian yang menjadi ciri khas disiplin ini: kegiatan untuk mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek (siklus bisnis), dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang (peningkatan pendapatan nasional). Model makroekonomi yang ada dan prediksi-prediksi yang ada jamak digunakan oleh pemerintah dan korporasi besar untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan strategi bisnis.

Sedangkan ekonomi makro daerah yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah hal-hal yang terkait dengan ekonomi makro daerah, khususnya terkait dengan indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi daerah, ketenagakerjaan, Indeks Harga Konsumen, konsumsi rumah tangga, investasi daerah, keuangan daerah, dan kemiskinan.

3.2 Ekonomi Daerah

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal (investasi) juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang baik, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan sektor ekonomi yang terbentuk dari laju pertumbuhan akan memberikan gambaran tentang tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, di

mana pergerakan laju pertumbuhan ini merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan dimasa yang akan datang. Di samping digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi, angka ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduk.

Pertumbuhan ekonomi secara riil disajikan melalui PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang riil biasanya didasarkan atas dasar harga konstan yang umumnya digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur ekonomi rakyat secara keseluruhan dalam arti luas, yaitu berapa banyak barang riil dan jasa-jasa yang dihasilkan untuk keperluan konsumsi dan investasi penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan perekonomian dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan penurunan perekonomian.

Selain pertumbuhan ekonomi, PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) juga merupakan salah satu indikator pembangunan yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas. Tinggi rendahnya PDRB per kapita suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu besaran PDRB yang dihasilkan suatu daerah dan jumlah penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi per kapita juga dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk memacu kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan output pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduknya.

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Kinerja ekonomi yang tercipta di suatu daerah dibagikan dengan seluruh

penduduk, maka akan diperoleh rata-rata pendapatan setiap penduduk selama setahun. Secara tidak langsung PDRB per kapita menggambarkan tingkat kemakmuran wilayah. Dikatakan tingkat kemakmuran wilayah karena belum memperhitungkan komponen-komponen lain, seperti: penyusutan, pajak tidak langsung neto, dan pendapatan neto yang mengalir dari dan ke daerah lain.

Berdasarkan data PDRB juga dapat diperoleh indikator tingkat inflasi. Akan tetapi, tingkat inflasi ini berbeda dengan tingkat inflasi yang biasa digunakan oleh pemerintah. Inflasi yang diperoleh dari data PDRB merupakan inflasi tingkat produsen, sedangkan inflasi yang biasa digunakan oleh pemerintah adalah inflasi tingkat konsumen.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui 2 (dua) metode penghitungan, yaitu: metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode perhitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari suatu daerah. Metode tidak langsung adalah metode perhitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokasikan PDRB provinsi menjadi PDRB kabupaten/kota dengan memakai berbagai indikator.

Metode langsung dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendekatan produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Pendekatan ini disebut juga pendekatan nilai tambah. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atau ikut sertanya dalam proses produksi, seperti: upah/gaji, sewa tanah, bunga, keuntungan, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.

Pendekatan pendapatan adalah menghitung nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi yang dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi, yaitu: upah/gaji, sewa tanah, bunga, keuntungan, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Untuk sektor pemerintah dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha (sewa tanah, bunga, keuntungan) tidak diperhitungkan.

Pendekatan Pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa di wilayah kabupaten/kota. Jadi, PDRB dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir, seperti: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi nirlaba, pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor.

Selanjutnya metode tidak langsung adalah mengalokasikan PDRB pada tingkat wilayah yang lebih tinggi (misalkan provinsi) untuk setiap wilayah lebih rendah (misalkan kabupaten/kota) dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang digunakan dapat didasarkan atas: a. nilai produksi bruto atau neto, b. jumlah produk fisik, c. jumlah tenaga kerja, d. jumlah penduduk, dan e. alokator lain yang dianggap cocok untuk setiap daerah.

Kemudian, metode perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu: revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda. Metode revaluasi dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara tahun berjalan dengan harga tahun dasar, hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan. Selanjutnya, nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengurangi output dengan biaya antara atas dasar harga konstan.

Dalam praktiknya, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang sangat banyak. Di samping itu data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi

semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

Metode ekstrapolasi dilakukan dengan cara mengalikan nilai tambah tahun dasar dengan indeks produksi. Indeks produksi yang biasa digunakan sebagai ekstrapolasi adalah indeks tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan sebagainya. Ekstrapolasi juga dapat dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

Metode deflasi dilakukan dengan cara membagi nilai tambah tahun berjalan dengan indeks harga. Indeks harga yang biasa digunakan sebagai deflator adalah indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar dan sebagainya.

Dalam deflasi berganda, yang dideflasi adalah output dan biaya antara, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan adalah indeks harga konsumen dan indeks harga perdagangan besar sesuai cakupan komoditinya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Kenyataannya, sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, di samping karena komponen terlalu banyak juga karena indeks harga belum tersedia secara baik. Oleh karena itu, dalam perhitungan harga konstan deflasi berganda belum banyak dipakai.

Selain pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan PDRB Per kapita, tingkat inflasi juga merupakan indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi suatu negara/wilayah/daerah. Laju pertumbuhan inflasi harus selalu diwaspadai dan dikendalikan, karena berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan. Inflasi yang tinggi mempunyai pengaruh agregatif terhadap perekonomian makro sebagai faktor eksternal dunia industri serta berdampak luas pula terhadap sektor perekonomian mikro yang merupakan faktor internal dunia bisnis. Inflasi yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat terutama terhadap produksi dalam negeri yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang nasional. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi merupakan upaya antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang saling bersinergi. Pada era otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengelola daerahnya masing-masing. Adanya otonomi daerah di kabupaten/kota telah mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah kabupaten/kota sangat tergantung oleh Kepala Daerahnya masing-masing.

Meningkatkan daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Peningkatan daya beli masyarakat jika diiringi dengan tingkat harga yang stabil dan terkendali akan menambah kesejahteraan mereka. Tingkat harga yang stabil dan terkendali ini dapat dipantau setiap saat, dan salah satu indikatornya adalah angka inflasi. Oleh sebab itu, informasi tentang angka inflasi di daerah sangat diperlukan pada era otonomi daerah.

Pengamatan perkembangan harga dari waktu ke waktu untuk mencari faktor utama penyebab kenaikan harga sangat diperlukan dalam rangka pengendalian harga tersebut. Apabila harga barang/jasa dapat

dikendalikan, maka tingkat inflasi juga terkendali. Tingkat inflasi merupakan salah satu variabel dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi agar tidak terjadi angka inflasi di daerahnya yang melebihi asumsi APBN tersebut.

3.3 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan Asas Umum Pengelolaan Keuangan dengan menambahkan uraian sebagai berikut:

- Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3.4 Metode Pendekatan

Pada prinsipnya pekerjaan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi tahun 2018 ini adalah kegiatan untuk mendeskripsikan, menggambarkan serta memberikan informasi yang jelas dan terang

mengenai kondisi perekonomian di Kota Tebing Tinggi yang meliputi ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan perkapita, tingkat konsumsi masyarakat, tingkat inflasi, PDRB, struktur ekonomi, keuangan dan perbankan daerah, tingkat pengangguran, serta indikator ekonomi lainnya yang dianggap relevan dengan kegiatan ini. Oleh karena itu, terkait dengan kebutuhan tersebut maka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi ini adalah dengan pendekatan teknik deskriptif analisis. Teknik ini pada dasarnya mentabulasi data dalam format grafik, tabel atau gambar, kemudian dilakukan analisis berdasarkan frekuensi dan persentase.

Kondisi ekonomi daerah yang dikaji adalah meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat inflasi, PDRB, serta indikator ekonomi lainnya yang dianggap relevan dengan kegiatan ini. Sedangkan variabel keuangan daerah yang akan dianalisis adalah pendapatan, belanja, dan penerimaan daerah beserta komponen rinci pada ketiga variabel tersebut. Kemudian pada analisis keuangan daerah dilakukan analisis rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio aktivitas, rasio pengelolaan belanja, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah.

Teknis analisis yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan pendekatan teknik deskriptif. Teknik ini pada dasarnya mentabulasi data dalam format grafik, tabel atau gambar, kemudian dilakukan analisis berdasarkan frekuensi dan persentase serta elastisitas. Lebih jauh lagi pada kegiatan ini akan dilakukan analisis regresi dan korelasi antar variabel yang dianggap saling terkait dengan ekonomi dan keuangan daerah.

Mengingat kegiatan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi ini sangat terkait dengan data-data statistik dan instansional, maka data yang digunakan adalah berbagai publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berupa Tebing Tinggi Dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Rakyat, PDRB Sektoral,

Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Harga Konsumen beserta dokumen terkait ekonomi yang dipublikasikan oleh BPS dan instansi terkait. Kemudian data dan informasi tersebut diolah dengan menggunakan *software* pengolahan data seperti SPSS (Statistical Purpose for Social Sciences), STATA¹(Statistical and Data), Eviews, dan excel)

3.5 Menganalisis Kondisi Ekonomi Tebing Tinggi 2015-2020

Analisis kondisi ekonomi Tebing Tinggi mencakup pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber pendapatan daerah yang dianalisis secara deskriptif. Melalui analisis ini diharapkan dapat diketahui perkembangan capaian pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pijakan untuk kebijakan tahun-tahun selanjutnya. Adapun data yang digunakan adalah data empiris makro ekonomi Kota Tebing Tinggi dari tahun 2015-2020. Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari RPJMD Kota Tebing Tinggi dan BPS (Badan Pusat Statistik).

3.6 Proyeksi Indikator Ekonomi Kota Tebing Tinggi

Proyeksi indikator ekonomi 2015-2020 meliputi Nilai PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, ICOR, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, IW, Indeks Gini. Proyeksi indikator ekonomi dihasilkan dengan menggunakan metode semi *average*. Data yang digunakan adalah data tahun sebelumnya dari tahun 2015-2020 untuk analisis asumsi yang digunakan yakni mencakup nilai PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ICOR, ketenagakerjaan, kemiskinan, Indeks Williamson, Indeks Gini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik)

3.7 Menyusun Perubahan Asumsi Ekonomi Makro tahun 2015-2020

Perubahan asumsi ekonomi makro dapat disusun berdasarkan analisis perbandingan target pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi dengan analisis makro ekonomi Kota Tebing Tinggi. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar target-target ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah lebih realistis dengan berpijak pada kondisi riilnya.

3.8 Menyusun Skema Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota di Kota Tebing Tinggi yang sesuai dengan target di RPJMD 2012-2017 dapat dipenuhi dengan menghitung proyeksi PDRB-nya. Nilai PDRB provinsi dan kabupaten/kota di Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2016-2020 kemudian dihitung proyeksinya untuk setiap lapangan usaha/sector berdasarkan *share* (kontribusi masing-masing lapangan usaha/sector agar dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan RPJMD Kota Tebing Tinggi.

Adapun data yang digunakan adalah data empiris PDRB total dan PDRB ADHK 2010 untuk setiap lapangan usaha/sector Kota Tebing Tinggi. Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari RPJMD Kota Tebing Tinggi

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Letak Geografis

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu pemerintah daerah dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 38,438 km². Berjarak sekitar 78 Km dari Kota Medan (ibukota Provinsi Sumatera Utara) serta terletak pada lintas utama Sumatera, yaitu yang menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera melalui Lintas Diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi – Pematangsiantar – Parapat – Balige – Siborongborong (Lihat Gambar 1). Kota Tebing Tinggi terletak pada 3°19'00" - 3°21'00" Lintang Utara dan 98°11' - 98°21' Bujur Timur. Kota Tebing Tinggi berada di bagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang dibatasi oleh PTPN III, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara dengan PTPN (Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara) III Kebun Rambutan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Selatan dengan PTPN IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Timur dengan PT. Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sebelah Barat dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela, Bandar Bajambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan letak geografisnya Kota Tebing Tinggi beriklim tropis, dengan ketinggian 18-34 meter dpl (di atas permukaan laut) dengan topografi mendatar 0 – 2 % dan bergelombang 2 – 15 %. Temperatur udara di kota ini cukup panas yaitu berkisar 25⁰ – 27⁰ C. Sebagaimana kota di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi mempunyai dua musim, penghujan dan kemarau dengan jumlah curah hujan sepanjang tahun rata-rata 1.776 mm/tahun dengan kelembaban udara 80% - 90%.

Sungai Padang merupakan sungai utama yang melintasi Kota Tebing Tinggi sepanjang ± 2.150 m dengan lebar ± 65 m. Sungai besar lainnya adalah Sungai Bahilang, Sungai Kelembah dan Sungai Sibarau. Sedangkan sungai-sungai kecil yang berada di wilayah Kota yaitu Sungai Sigiling, Sungai Sibarau, Sungai Mandaris, Sungai Marimah, dan Sungai Martebing. Sungai-sungai tersebut mempunyai pola aliran ke arah utara dan timur laut. Adapun kawasan yang rawan genangan air/ banjir di Kota Tebing Tinggi berada di Kelurahan Bandar Utama, Bandar Sakti, Persiakan, Bandar Sono, Mandailing, Bagelen, Rambung, Tambangan, Berohol, dan Rantau Laban.

4.2 Wilayah Administrasi dan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 31 November 2006, Kota Tebing Tinggi terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Kelurahan Pabatu untuk Kecamatan Padang Hulu, Kelurahan Tanjung Marulak untuk Kecamatan Rambutan, Kelurahan Tebing Tinggi untuk Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Pinang Mancung untuk Kecamatan Bajenis, dan Kelurahan Mandailing untuk Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Setiap Kelurahan berjarak kurang dari lima kilometer dari pusat pemerintahan masing-masing kecamatan. Luas kecamatan dan kelurahan Se-Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Luas Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan dengan luas wilayah 38,438 km². Kecamatan Padang Hilir merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 11,441 km² atau 29,76 persen dari luas Kota Tebing Tinggi. Sedangkan kelurahan terluas adalah Kelurahan Berohol (Kecamatan Bajenis) dengan luas 246,60 Ha. Sebagian besar (45,55 persen) lahan di Kota Tebing Tinggi digunakan sebagai lahan pertanian.

Tabel 4.1 Luas Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tebing Tinggi

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
1. Padang Hilir		1.144,10
	Tebing Tinggi	357,38
	Damar Sari	97,62
	Tambangan	137,34
	Tambangan Hulu	239,16
	Satria	58,90
	Bagelen	191,23
	Deblod Sundoro	62,47
2. Padang Hulu		851,10
	Pabatu	116,33
	Padang Merbau	149,67
	Bandar Sono	139,70
	Persiakan	90,20
	Tualang	113,20
	Lubuk Baru	140,11
	Lubuk Raya	101,89
3. Rambutan		593,50
	Tanjung Marulak	48,19
	Tanjung Marulak Hilir	65,31
	Rantau Laban	11,63
	Mekar Sentosa	88,17
	Lalang	89,70
	Sri Padang	61,30
	Karya Jaya	229,20
4. Bajenis		907,80
	Bulian	150,10
	Bandar Sakti	78,10

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
	Pinang Mancung	126,83
	Teluk Karang	36,17
	Pelita	129,60
	Berohol	246,60
	Durian	140,40
5. Tebing Tinggi Kota		347,30
	Pasar Gambir	33,40
	Badak Bejuang	43,30
	Pasar Baru	28,20
	Bandar Utama	98,00
	Rambung	72,20
	Tebing Tinggi Lama	48,00
	Mandailing	24,20
Kota Tebing Tinggi		3.843,80

Sumber: Kota Tebing Tinggi dalam Angka, 2020

4.3 Kondisi Demografi Daerah

Berdasarkan proyeksi data BPS, jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi tahun 2019 adalah 164.402 jiwa, yang terdiri dari 81.281 laki – laki dan 83.121 perempuan. Dari tabel terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bajenis sebesar 37.909 jiwa. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Rambutan sebesar 36.392 jiwa, Padang Hilir 34.406 jiwa, Padang Hulu sebanyak 30.604 jiwa, dan terakhir Tebing Tinggi Kota sebesar 25.451 jiwa.

Dengan luas wilayah Kota Tebing Tinggi 38,438 km² yang didiami oleh 164.402 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Tebing Tinggi adalah 4.28 ribu jiwa per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi Kota sebanyak 7,33 ribu jiwa per kilo meter persegi, sedangkan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Padang Hilir sebanyak 2,98 ribu jiwa per kilo meter persegi.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
	2019	2019	2019
Padang Hulu	15.099	15.505	30.604
Tebing Tinggi Kota	12.398	13.053	25.451
Rambutan	17.894	18.498	36.392
Bajenis	18.842	19.067	37.909
Padang Hilir	17.048	16.998	34.046
Tebing Tinggi	81.281	83.121	164.402

Sumber: <https://tebingtinggikota.bps.go.id/site/result>

Penduduk laki- laki di Kota Tebing Tinggi lebih sedikit dari penduduk perempuan, yang ditunjukkan dengan sex rasio 97,79. Artinya ada sekitar 98 orang laki- laki dalam 100 orang perempuan. Berdasarkan data Tebing Tinggi Dalam Angka 2019 menunjukkan bahwa penduduk usia Produktif (usia 15-64 tahun) di Kota Tebing Tinggi mencapai 71,93 persen dari jumlah penduduk keseluruhan, sementara Penduduk Usia Non Produktif (usia 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 28,07 persen.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Tebing Tinggi Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2019 sebanyak 179 orang, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebanyak 236. Pencari kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pada Tahun 2017 lebih banyak laki-laki yaitu sebanyak 79 orang, dibandingkan perempuan yang hanya sebanyak 100 orang. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas Ketenagakerjaan berpendidikan terakhir SMU sebanyak 155 orang dan tamatan sarjana 24 pekerja

4.4 Kondisi Sosial

A. Pendidikan

Pendidikan sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) para pelaku ekonomi, termasuk di dalamnya pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Tingkat pendidikan memiliki hubungan linear terhadap kualitas sumber daya manusia para pengusaha dan tenaga kerja pada UKMK.



Berdasarkan data dari Tebing Tinggi Dalam Angka 2019 bahwa di Kota Tebing Tinggi fasilitas pendidikan berupa sekolah sudah cukup banyak jumlahnya dari berbagai tingkat pendidikan. Pada tahun 2019/2020, sarana gedung Sekolah Dasar (SD) dan MI sebanyak 98 unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan MTs sebanyak 27 unit dan sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), SMK dan MA sebanyak 22 unit. Sementara itu, jumlah guru SD dan MI sebanyak 1.031 orang, guru SLTP dan MTs 596 orang, dan guru SLTA, SMK dan MA 793 orang. Fasilitas tersebut untuk melayani sebanyak 19.200 orang murid SD dan MI, 10.392 orang murid SLTP-MTs, dan 12.932 orang murid SLTA, SMK dan MA.

B. Kesehatan

Berdasarkan data Tebing Tinggi Dalam Angka 2018, guna melayani kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, di Kota Tebing Tinggi terdapat 33 unit fasilitas kesehatan dan 905 tenaga medis dan 214 tenaga non medis. Kapasitas tempat tidur yang tersedia pada rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Tebing Tinggi sebanyak 869 tempat tidur. Selama tahun 2019, dari kasus 10 penyakit terbanyak, kasus penyakit ISPA merupakan kasus tertinggi yang ditangani yaitu sebanyak 20.134 kasus, diikuti dengan penyakit tekanan darah tinggi sebanyak 7.290 kasus serta penyakit rongga mulut sebanyak 5.779 kasus.



Keluarga Berencana pada tahun 2019 jumlah akseptor aktif sebanyak 11.648 pasangan (77,11persen dari jumlah Pasangan Usia Subur), dengan akseptor baru 4.834 pasangan. Dari seluruh akseptor aktif, sebagian besar memilih suntik dan pil sebagai alat kontrasepsi, jumlah masing-masing sebanyak 7.843 pasangan (539,23persen) dan 3.362 pasangan (24,73 persen).

4.5 Kondisi Ekonomi

A. Industri

Salah satu sektor yang penting untuk pertumbuhan ekonomi adalah industri. Berdasarkan data Tebing Tinggi Dalam Angka 2019, di Kota Tebing Tinggi pada umumnya, Industri



Besar/Sedang di Kota Tebing Tinggi berstatus koperasi satu unit, berstatus PT lima unit dan berstatus CV satu unit. Lokasi usaha paling banyak di Kecamatan Bajenis sebanyak lima unit. Tenaga Kerja Industri Besar/Sedang umumnya bekerja pada kelompok industri kimia, minyak bumi, Batubara, karet dan plastik yaitu sebanyak 952 orang. Besarnya nilai output yang dihasilkan oleh industri besar/sedang tahun 2019 mencapai 1.187 milyar rupiah. Sementara biaya input yang dikeluarkan pada tahun 2015 mencapai 1.241 milyar rupiah. Dengan demikian nilai tambah yang dihasilkan tahun 2019 mencapai 116,047 milyar rupiah.

Kemudian, jumlah pelanggan listrik yang dilayani PLN Ranting Kota Tebing Tinggi tahun 2019 sebanyak 73.032 pelanggan. Pelanggan terbesar adalah pelanggan pasca bayar yaitu sebanyak 48.341 unit pelanggan. Sementara jumlah energi listrik yang terjual tahun 2019 mencapai 200.480 MWH dengan nilai penjualan 216 Milyar Rupiah.

Sedangkan pada tahun 2019 PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi melayani kebutuhan air bersih untuk 10.516 pelanggan dan menyalurkan 2.341.924 m³ air bersih. Pengguna air bersih terbesar adalah kelompok konsumen rumah tangga sebanyak 9.204 pelanggan dengan volume pemakaian sebesar 1.858.927 m³.

B. Keuangan, Perbankan, dan Koperasi

Berdasarkan Tebing Tinggi Dalam Angka 2018, Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi terus mengalami pasang surut. Pada Tahun Anggaran 2011 APBD Kota Tebing Tinggi 412,20 milyar rupiah; TA. 2012 APBD Kota Tebing Tinggi menjadi 481,61 milyar rupiah; TA. 2013 naik menjadi 596,24 milyar rupiah; TA. 2014 bertambah menjadi 628,62 milyar rupiah, TA. 2015 meningkat hingga 667,06 milyar rupiah, TA. 2016 mencapai 707,94 milyar rupiah, dan pada TA 2017 mencapai 711,63 milyar rupiah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi pada TA 2017 sebesar 113,22 milyar rupiah, naik sekitar 20,39 persen dari TA 2016 yang hanya sebesar 94,04 milyar rupiah. Dan tahun 2019 sebesar 94,04 milyar rupiah juga

Selanjutnya, posisi dana simpanan pada Bank umum dan BPR di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 mencapai 5,52 triliun rupiah. Jumlah ini turun sekitar 14,64 persen dari posisi akhir tahun 2018 yakni sebesar 6,46 triliun rupiah. Peningkatan terjadi pada kredit yang disalurkan. Pada akhir tahun 2019, posisi kredit yang diberikan berada pada posisi 2,76 triliun rupiah, atau naik sekitar 5,46 persen dari tahun 2018.

Sementara itu persentase posisi pinjaman terhadap posisi simpanan pada akhir tahun 2019 sebesar 50,05 persen. Keadaan ini lebih tinggi dari posisi akhir tahun 2018 yang sebesar 40,38persen. Dana simpanan pada bank umum dan BPR tahun 2019 di Kota Tebing Tinggi utamanya berupa Tabungan sebesar 44,59 persen, Simpanan Berjangka sekitar 43,8 persen, sedangkan sisanya 11,6 persen dalam bentuk giro. Kredit yang disalurkan oleh bank umum dan BPR di Kota Tebing Tinggi umumnya untuk keperluan

modal kerja (31,43 persen) dan konsumsi (54,83 persen), sedangkan yang digunakan sebagai investasi hanya 13,73 persen

Kemudian, Jumlah nasabah perum pegadaian di Kota Tebing Tinggi terus mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah nasabah mencapai 58.954 nasabah, atau meningkat sebanyak 2.262 nasabah (3,84%) dari tahun 2018. Jumlah nasabah yang meningkat diikuti dengan pemberian kredit mengalami peningkatan. Nilai pemberian kredit Perum Pegadaian pada tahun 2019 mencapai 185,5 milyar rupiah

Di tahun 2019, terdapat 232 koperasi yang berada di kota Tebing Tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi Kota adalah kecamatan dengan jumlah koperasi terbanyak di Kota Tebing Tinggi yakni sebanyak 83 unit. Berdasarkan banyaknya simpanan koperasi menurut kecamatan di Kota Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Kota adalah kecamatan dengan simpanan terbanyak yakni sebesar 619.517 milyar rupiah. Pada tahun 2019 jumlah koperasi di Kota Tebing Tinggi yang tercatat pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi sebanyak 232 unit dengan jumlah anggota 132.405 orang. Selain itu, jumlah pinjaman juga mengalami peningkatan pada tahun 2019. Nilai pinjaman pada tahun 2019 mencapai 499,77 milyar rupiah.

C. Pendapatan Regional

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku, Kinerja ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2019 sebesar 5,92 triliun rupiah. Angka tersebut naik sekitar 6,92 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,51 triliun rupiah. Akan tetapi kinerja ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jika faktor inflasi dihilangkan, kinerja ekonomi riil di Kota Tebing Tinggi

tahun 2019 yang diukur dengan besaran PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3,95 triliun rupiah.

Kinerja riil tersebut lebih tinggi dari tahun 2018 yang sebesar 3,76 triliun rupiah. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi mencapai 5,15 persen. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan ekonomi yang paling cepat terjadi di sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai 8,77 persen

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 23,72 persen, sedangkan sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 14,94 persen. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar lainnya adalah sektor industri pengolahan yakni sebesar 12,26 persen. Secara umum, situasi perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 sedikit lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

5.1 RPJMD Kota Tebing Tinggi

RPJMD merupakan dokumen yang memuat Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, program prioritas Walikota dan Wakil Walikota beserta penjabarannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dasar penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022 berdasar pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD ini bertujuan untuk pedoman arah perencanaan dan pembangunan Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada kondisi, permasalahan, isu strategis di daerah guna dasar penyusunan program, kerangka pendanaan dan indikator kinerja. Dokumen RPJMD ini juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi, Renstra dan Renja OPD.

Setelah memperhatikan dan melakukan review singkat atas RPJMD Kota Tebing Tinggi, khususnya kinerja indikator utama (IKU) Kota Tebing Tinggi yang terkait dengan ekonomi makro, diperoleh indikator kinerja seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB Per kapita, konsumsi rumah tangga, tingkat kemiskinan, nilai investasi, dan tingkat pengangguran. Selanjutnya indikator kinerja ekonomi makro ini akan dianalisis berdasarkan data *time series* yang tersedia dan dilakukan proyeksi sampai dengan tahun akhir rencana RPJMD Kota Tebing Tinggi yaitu tahun 2022. Hasil analisis ekonomi makro dan proyeksi ini kemudian dirumuskan sebagai masukan kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kota Tebing Tinggi.

5.2 Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi, di mana Perda dimaksud merupakan tindaklanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya diundangkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi sebagai turunan Perda Nomor 3 Tahun 2016.

Kemudian, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusunlah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi tahun 2017-2022.

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam RENSTRA tersebut memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas menjalankan sebagian urusan daerah dibidang informasi yang berbasis TIK, di samping beban tugas lain yang tak kalah pentingnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dituju. Dalam hal ini, ada 2 (dua) perencanaan yang harus dilakukan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi 2017 – 2022. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud, menjadi landasan dan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi dalam merencanakan pembangunan 5 Tahun ke depan. Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi. sekaligus untuk mendukung tercapainya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Tebing Tinggi terpilih yaitu; Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”.

Dan selanjutnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintah dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika dengan memanfaatkan teknologi Komunikasi dan Informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat informasi atau masyarakat berbasis ilmu pengetahuan yang berdaya saing.

Dengan memperhatikan RPJMD Kota Tebing Tinggi dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan misi pertama yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang Baik. Selanjutnya program yang sangat terkait dengan data-data ekonomi makro adalah program pengembangan data/informasi statistik daerah. Dengan kegiatan analisis ekonomi makro ini, maka Dinas akan terbantu dengan tersedianya data dan informasi ekonomi makro selain data-data terbitan BPS Kota Tebing Tinggi. Dan selanjutnya dapat digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam menunjang pengelolaan data dan informasi ekonomi makro daerah.

BAB VI

OUT LOOK EKONOMI

DAERAH

6.1 Ketenagakerjaan

Sektor Ketenagakerjaan (work force sector) merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi nasional dan khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, melalui pelbagai program yang sering kali berhasil meningkatkan tingkat pendapatan. Demikian juga dengan program yang bertujuan meningkatkan ketrampilan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta produktivitas dari mereka yang berpenghasilan rendah.

Masalah ketenagakerjaan, akhir-akhir ini diperkirakan akan semakin kompleks dan membutuhkan perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak yang terkait, baik dari pemerintah, pengusaha maupun tenaga kerja itu sendiri. Indikasi ini terlihat dari penambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya, masih banyaknya pengangguran terbuka maupun terselubung atau bekerja kurang, sebagai akibat dari budaya bercorak agraris, lapangan pekerjaan yang sangat terbatas karena situasi perekonomian yang belum membaik serta semakin menumpuknya pengangguran terdidik, banyaknya sarjana dan tenaga kerja yang tidak produktif sebagai konsekuensi dari peningkatan taraf pendidikan masyarakat sementara lapangan pekerjaan sudah semakin sempit.

Buruknya kondisi perekonomian kita terakhir ini juga mempunyai dampak yang kurang menguntungkan bagi pemberdayaan sumber daya manusia karena berakibat kepada tingginya harga bahan baku,

peralatan/mesin serta biaya produksi lainnya yang dapat menyebabkan bangkrut/tutup perusahaan-perusahaan, terutama pabrik-pabrik yang menyerap tenaga kerja. Dampak yang lebih lanjut merupakan tingginya angka pengangguran karena PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kota Tebing Tinggi, maka dalam bagian ini akan diulas secara singkat keadaan ketenagakerjaan, yang dilihat dari penduduk usia kerja, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan jam kerja, serta indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

6.1.1 Penduduk Usia Kerja

Penduduk termasuk kategori usia kerja apabila berumur 15 tahun ke atas, yang dapat digolongkan menjadi : Angkatan Kerja (AK), bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan; dan Bukan Angkatan Kerja (BAK), bila mereka bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Di Kota Tebing Tinggi, jumlah penduduk usia kerja dalam beberapa tahun terakhir ini, mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun bila dirinci menurut persentase masing-masing kegiatan baik untuk Angkatan Kerja maupun Bukan Angkatan Kerja serta membandingkan keadaan antara kedua kategori tersebut, ternyata sepanjang tahun 2006 – 2017 persentase penduduk yang tergolong Angkatan Kerja lebih besar dari pada penduduk yang Bukan Angkatan Kerja, demikian juga untuk tahun berikutnya (2018-2019) jumlah Angkatan kerja selalu lebih besar daripada penduduk Bukan Angkatan Kerja di kota Tebing Tinggi.

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk dan Persentase Berumur 15 tahun ke atas di

Kota Tebing Tinggi menurut Penduduk Usia Kerja (Jiwa)

Tahun	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Usia Kerja
2006	55.561	37.145	92.706
2007	51.200	40.345	91.445
2008	55.963	41.134	97.097
2009	59.717	39.198	98.915
2010	72.686	37.810	110.496
2011	66.394	32.251	98.645
2012	65.196	34.361	99.557
2013	65.619	39.531	105.150
2014	71.024	39.196	110.220
2015	70.362	41.669	112.031
2016	NA	NA	NA
2017	73.227	42.356	115.583
2018	80.439	36.800	117.239
2019	79.388	39.607	118.995

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.

6.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia 15 tahun ke atas, ke dalam pasar kerja. Semakin tinggi TPAK berarti semakin besar keterlibatan mereka.

Sedangkan Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran akan merugikan daerah dan akan memberatkan keluarga karena kebutuhannya menjadi beban keluarga yang sudah bekerja. Makin tinggi tingkat *Dependency*

Ratio (DR), makin buruk tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk produktif. Di dalam ilmu ekonomi pengangguran ada beberapa jenis, antara lain sebagai berikut.

- Pengangguran siklis adalah pengangguran yang disebabkan merosotnya perekonomian atau resesi ekonomi suatu negara.
- Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena tidak sesuai jenis pekerjaan yang diminta dengan yang ditawarkan.
- Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Biasanya terjadi di daerah pertanian.
- Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya modernisasi dalam berproduksi.
- Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya pergeseran antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Misalnya, tenaga kerja yang keluar dari pekerjaan karena ingin pekerjaan yang lebih baik.
- Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena kesempatan kerja lebih sedikit jika dibandingkan angkatan kerja.

Dalam kegiatan ini Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja.

Tabel 6.2 TPAK dan TPT di Kota Tebing Tinggi Tahun 2008-2019
(Persen)

Variabel	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TPAK	57,64	60,37	65,78	67,31	65,49	62,41	64,44	62,81	NA	63,35	68,61	66,72

TPT	11,51	11,47	9,54	8,36	11,33	7,36	7,23	10,46	NA	9,73	7,23	8,60
-----	-------	-------	------	------	-------	------	------	-------	----	------	------	------

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.

6.1.3 Lapangan Pekerjaan

Keterlibatan penduduk yang bekerja di suatu lapangan pekerjaan, biasanya di pengaruhi oleh faktor keterampilan/kondisi alam maupun situasi ekonomi di suatu daerah. Untuk dapat melihat sejauh mana setiap lapangan usaha menyerap tenaga kerja, maka lapangan usaha dapat dibagi atas kelompok sektor sebagai berikut : *Agriculture (A)*; *Manufactory (M)* yang terdiri dari sektor Pertambangan/penggalan, Industri pengolahan, Listrik, gas dan air, dan Konstruksi; *Service (S)* yang terdiri dari sektor Angkutan, Perdagangan, Keuangan, Jasa kemasyarakatan dan Lainnya Penyediaan lapangan pekerjaan biasanya mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi, kalau pada masa awal perkembangan ekonomi lebih banyak penduduk bekerja di sektor pertanian maka sejalan dengan perkembangan ekonomi terjadi transformasi lapangan pekerjaan menuju lapangan pekerjaan yang semakin kompleks yaitu industri dan akhirnya tahap jasa (services).

Di Kota Tebing Tinggi sebagian besar tenaga kerja bekerja di Lapangan Usaha Jasa (S), terlihat pada tabel di bawah ini bahwa di tahun 2014 persentasenya sebesar 76,54 %, naik menjadi 82,70 % pada tahun 2015, dan menurun pada tahun 2016 dan 2017. Tahun 2018 persentase menjadi naik dari 70,63 % menjadi 74,04 % dan turun kembali di tahun 2019 menjadi 71,11 %. Bila dibedakan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa pekerja laki-laki dominan terserap di Lapangan Usaha Manufaktur, sementara untuk pekerja perempuan terserap pada sektor Jasa.

Pergeseran Lapangan Pekerjaan di Kota Tebing Tinggi tahun 2017 sudah sampai pada tahap jasa-jasa di mana untuk kelompok sektor Jasa

menyerap 70,63 % dari total tenaga kerja. Kemudian untuk sektor pertanian mengalami kenaikan dari 5,43 % tahun 2014 menjadi sebesar 10,24 % tahun 2015, menurun menjadi 9,28 % di tahun 2016, dan semakin menurun di tahun berikutnya menjadi 5,76 % tahun 2019. Sedangkan sektor Manufaktur mengalami penurunan dari 18,03 % tahun 2014 menjadi sebesar 7,06% tahun 2015, naik menjadi 21,29 % tahun 2017, lalu mengalami penurunan kembali di tahun 2018 sebesar 2,18 % menjadi 19,11 %, dan mengalami kenaikan kembali menjadi 23,14 % di tahun 2019. Pergeseran tersebut terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.3 Komposisi Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang bekerja di Kota Tebing Tinggi menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2014-2019

Tahun	Jenis Kelamin	Pertanian (A)	Manufaktur (M)	Jasa (S)
2014	L	6,36	26,12	67,52
	P	3,97	5,37	90,66
	L+P	5,43	18,03	76,54
2015	L	12,50	9,45	78,04
	P	6,55	3,16	90,29
	L+P	10,24	7,06	82,70
2016	NA	NA	NA	NA
2017	L	10,26	25,21	64,54
	P	4,61	15,02	80,37
	L+P	8,08	21,29	70,63
2018	L	9,13	25,57	65,30

Tahun	Jenis Kelamin	Pertanian (A)	Manufaktur (M)	Jasa (S)
	P	3,57	9,84	86,59
	L+P	6,85	19,11	74,04
2019	L	7,95	30,73	61,32
	P	2,39	11,50	86,11
	L+P	5,76	23,14	71,11

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.

Bila dikaji berdasarkan jenis kelamin, baik pada tahun 2014, 2015 sampai dengan tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak persentase perempuan yang bekerja di sektor Jasa (S) dibanding dengan penduduk laki-laki, yaitu sebanyak 90,66 persen pada tahun 2014, sebanyak 90,29 persen tahun 2015, 93,01 persen tahun 2016, 80,37 persen tahun 2017, 86,59 persen tahun 2018, dan menjadi 86,11 persen pada tahun 2019. Namun sebaliknya, di sektor Pertanian (A) dan Manufaktur (M) justru lebih banyak dilakoni penduduk laki-laki, yaitu sebanyak 6,36 persen pada sektor pertanian pada tahun 2014 dan naik 2 tahun setelahnya menjadi 12,64 persen di tahun 2016, lalu mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 7,95 persen di tahun 2019. Kemudian, untuk sektor manufaktur sebanyak 26,12 persen tahun 2014 dan turun drastis menjadi 9,45 persen tahun 2015, dan mengalami kenaikan yang drastis di tahun berikutnya menjadi 30,73 persen tahun 2019.

6.1.4 Status Pekerjaan

Selain dibedakan menurut jenis pekerjaan yang dilakukan, penduduk yang bekerja dapat dibagi atas 7 macam status pekerjaan, di mana dalam hal ini dapat dilihat apakah mereka sebagai pengusaha, buruh atau hanya sebagai pekerja keluarga yang tidak menerima upah/gaji. Adapun ketujuh macam status pekerjaan tersebut adalah:

- Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain.
- Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap.
- Berusaha dengan buruh tetap.
- Buruh/karyawan Pemerintah/swasta.
- Pekerja bebas di pertanian
- Pekerja bebas di non pertanian
- Pekerja keluarga.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif tradisional, sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern terdapat lebih banyak buruh dan karyawan dan pengusaha dengan buruh tetap. Untuk Kota Tebing Tinggi, status buruh/karyawan/pegawai dan berusaha sendiri merupakan status pekerjaan yang paling dominan di antara tujuh status pekerjaan yang tersebut di atas. Dalam dua tahun terakhir, kedua status pekerjaan untuk tahun 2018 dan 2019 lebih dari setengah persen dari penduduk yang bekerja termasuk golongan buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu untuk status pekerjaan berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja tak dibayar dalam kurun waktu dua tahun terakhir persentasenya mengalami penurunan

Tabel 6.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019

Status Pekerjaan Utama	2018			2019		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1. Berusaha Sendiri	NA	NA	NA	25,08	26,35	25,58
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	NA	NA	NA	4,50	6,97	5,48

3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	NA	NA	NA	5,75	2,34	4,41
4. Buruh/Karyawan/Pegawai	NA	NA	NA	57,97	49,46	54,61
5. Pekerja bebas di pertanian	NA	NA	NA	3,49	3,68	3,57
6. Pekerja bebas di non pertanian	NA	NA	NA	3,21	11,19	6,36
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	NA	NA	NA	25,08	26,35	25,58

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.

6.2 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran di dalam suatu rumah tangga sangat erat kaitannya dengan pendapatan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran jumlah pendapatan yang diterima. Akan tetapi gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pendapatan sulit dilakukan karena adanya hambatan teknis di lapangan, terutama pada saat wawancara petugas dengan responden. Oleh karena itu pendapatan rumah tangga diperkirakan dari data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan penduduk. Secara umum, pengeluaran rumah tangga dibedakan atas pengeluaran untuk makan dan bukan makanan. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan dari pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat

kesejahteraan penduduk dan perubahan komposisinya sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.059.687, dan naik sebesar 0,98% menjadi Rp. 1.081.311 pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.5 Rata-rata Pengeluaran Per kapita Sebulan dan Persentasenya menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018 – 2019

Tahun	Jenis Pengeluaran	Jenis Pengeluaran		Jumlah
		Makanan	Bukan Makanan	
2018	Jumlah (Rp)	518.975	540.712	1.059.687
	%	48,97	51,03	100,00
2019	Jumlah (Rp)	519.501	561.810	1.081.311
	%	48,04	51,96	100,00

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.

Bila diperhatikan data pada tabel di atas, rumah tangga di Kota Tebing Tinggi, penggunaan pendapatannya masih lebih besar untuk kebutuhan makanan daripada kebutuhan lainnya. Hanya pada tahun 2019, pola ini berubah di mana pengeluaran bukan makanan telah mencapai 51,96%. Dengan demikian yang perlu disikapi oleh masyarakat adalah semakin maju/tingginya tingkat ekonomi rumah tangga harus dapat ditunjukkan dengan berkurangnya pengeluaran untuk makanan dan meningkatnya pengeluaran bukan makanan. Jika dibandingkan dengan daerah perkotaan yang lain di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi termasuk kota yang pengeluaran per kapita/bulan penduduknya nomor 4 (tiga) tertinggi pada tahun 2019, setelah Kota Medan dan Kota Pematangsiantar.

6.3 Struktur Ekonomi (PDRB) Daerah Kota Tebing Tinggi

Pada tahun 2019, PDRB di Kota Tebing Tinggi yang tertinggi pada lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor dengan kontribusi terbesar, sebesar 23,72 persen, kemudian disusul Konstruksi dengan kontribusi sebesar 14,94 persen, Industri Pengolahan sebesar 12,26 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,33 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.6 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2019

Lapangan Usaha		PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Persentase
(1)		(2)	(3)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	74 265	1,25
B	Pertambangan dan Penggalian	8 096	0,14
C	Industri Pengolahan	726 286	12,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8 299	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13 770	0,23
F	Konstruksi	885 213	14,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1 404 947	23,72
H	Transportasi dan Pergudangan	470 831	7,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	245 263	4,14
J	Informasi dan Komunikasi	113 324	1,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	293 240	4,95
L	Real Estat	491 455	8,30
M, N	Jasa Perusahaan	26 571	0,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	671 396	11,33
P	Jasa Pendidikan	369 614	6,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68 656	1,16
R, S, T, U	Jasa Lainnya	52 974	0,89
Produk Domestik Regional Bruto		5.12.3215,86	100,00

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.

6.3.1 Perkembangan dan Kontribusi PDRB berdasarkan Lapangan

Usaha

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Tebing Tinggi semakin bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi. Sumbangan terbesar pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi dan Industri Pengolahan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib Sosial kemudian lapangan usaha Real Estate, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Pendidikan dan Jasa Keuangan dan Asuransi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.7 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2019

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,55	1,49	1,41	1,35	1,31	1,27	1,28	1,25
B Pertambangan dan Penggalian	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14
C Industri Pengolahan	15,76	15,64	14,40	13,49	13,12	13,30	12,81	12,26
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,21	0,21	0,21	0,22	0,24	0,25	0,24	0,23
F Konstruksi	13,58	13,83	14,00	14,20	14,19	14,45	14,76	14,94
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	19,43	19,16	20,02	20,70	21,51	21,98	22,73	23,72
H Transportasi dan Pergudangan	7,53	7,63	7,83	7,90	8,01	8,07	7,98	7,95
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,51	4,34	4,31	4,27	4,15	4,15	4,13	4,14
J Informasi dan Komunikasi	2,29	2,11	1,98	1,92	1,88	1,89	1,89	1,91
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,79	5,93	5,86	5,81	5,56	5,31	5,18	4,95
L Real Estat	8,35	8,50	8,27	8,31	8,36	8,32	8,33	8,30
M, N Jasa Perusahaan	0,48	0,49	0,50	0,49	0,50	0,48	0,46	0,45
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	11,13	11,33	11,88	12,28	12,27	11,93	11,61	11,33
P Jasa Pendidikan	6,88	6,92	6,93	6,66	6,57	6,26	6,24	6,24

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,06	1,07	1,08	1,08	1,06	1,15	1,16
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,08	1,04	1,02	1,00	0,98	0,94	0,92	0,89
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.

6.4 Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Kota Tebing Tinggi menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi sub kategori atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2009). Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

1. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

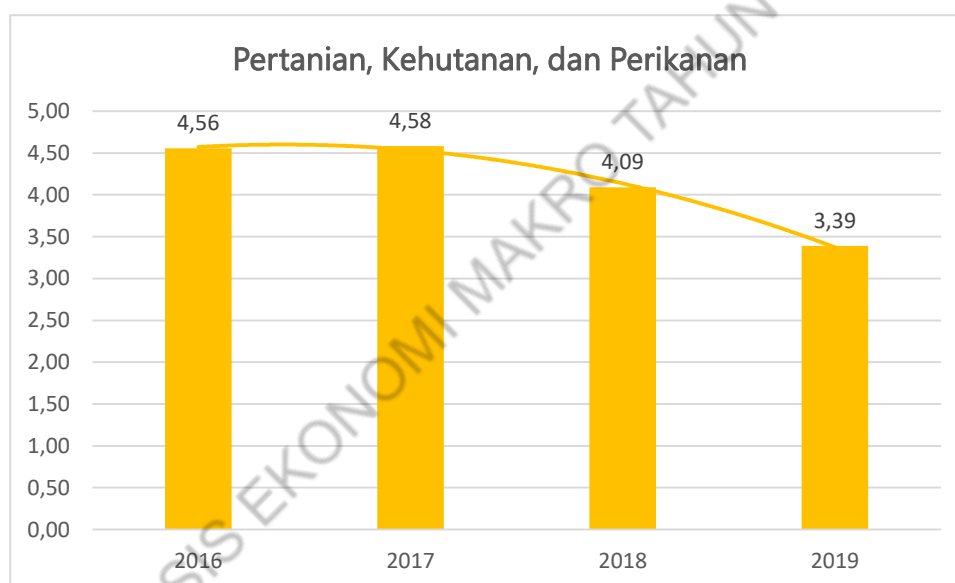
Lapangan usaha ini mencakup Sub lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub lapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan sub lapangan Usaha Perikanan. Di Sumatera Utara, lapangan usaha ini masih menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2017 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB ADHB sebesar 1,27 persen mengalami penurunan dari tahun 2016 yang sebesar 1,31 persen. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 1,28 persen, namun mengalami penurunan 0,3 persen pada tahun 2019 menjadi 1,25 persen

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,35	1,31	1,27	1,28	1,25

PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 6.8 Kontribusi Kategori Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2015-2019

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.1 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019

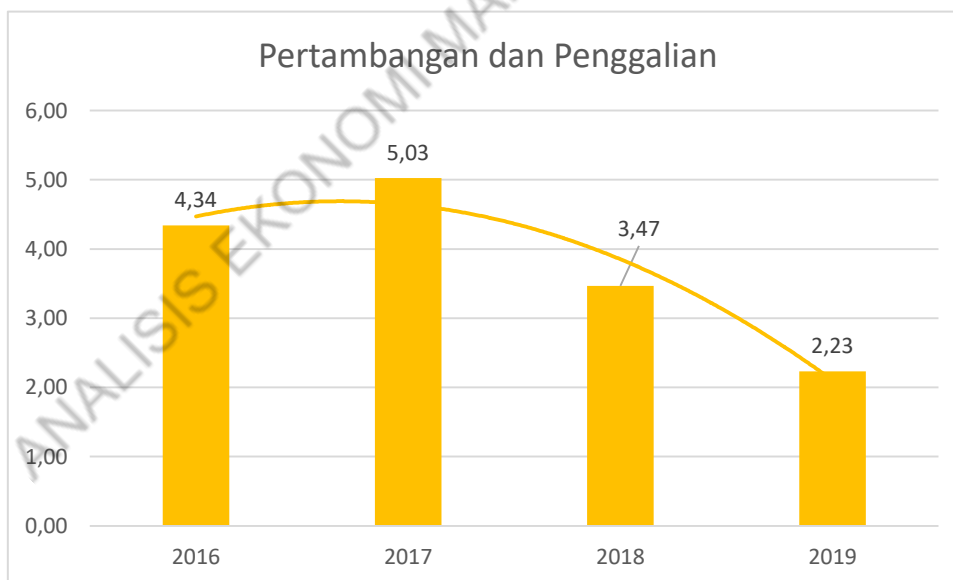
2. Pertambangan dan Penggalian

Kategori Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, lapangan usaha berkontribusi sebesar 0,14 pada tahun 2018 dan 2019. Salah satu faktor yang mendorong bertumbuhnya sub lapangan ini adalah usaha Penggalian Pasir. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2019

Tabel 6.9 Kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen), 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertambangan dan Galian	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.2 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Tahun 2015 - 2019

3. Industri Pengolahan

Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun 2017 menyumbang 13,30 persen naik dari tahun 2016 yang sebesar 13,12

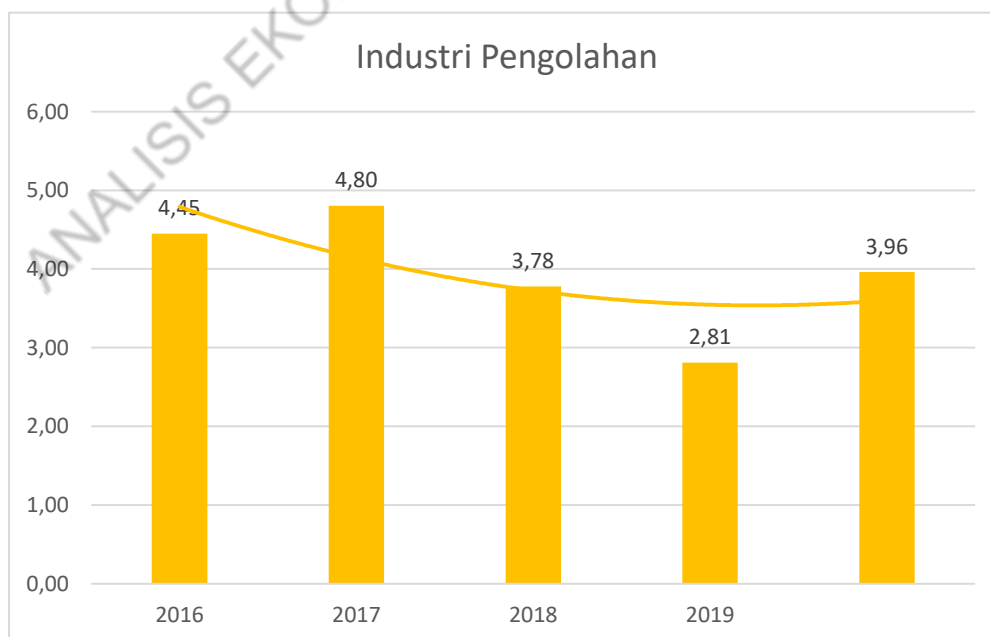
persen, dan pada tahun 2018 adalah sebesar 12,81 persen serta tahun 2019 adalah 12,26 persen. Industri pengolahan memberikan kontribusi relatif besar terhadap PDRB selama kurun waktu tahun 2012-2019, yaitu di atas 12 persen setiap tahunnya

Tabel 6.10 Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen), 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Industri Pengolahan	13,49	13,12	13,30	12,81	12,26
PDRB ADHB	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2018 adalah 3,64 yang menurun secara drastis dari tahun 2017 sebesar 9,85 persen, dan kembali menurun pada tahun 2019 sebesar 2,83 persen



Gambar 6.3 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun 2015 - 2019

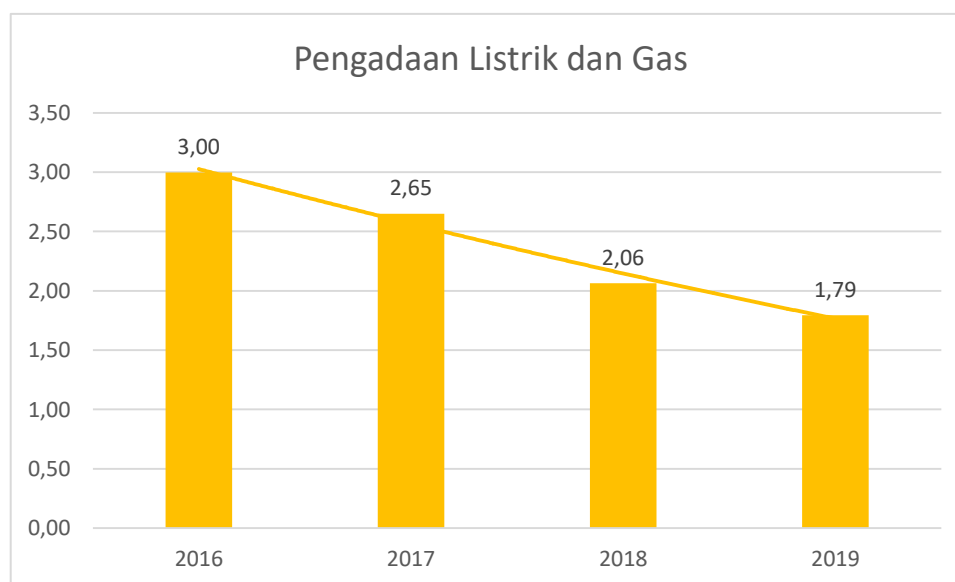
4. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,14 persen terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 dan 2019, naik dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 0,13 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2019 adalah sebesar 7,70 persen.

Tabel 6.11 Kontribusi Kategori Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.4 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2015 - 2019

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

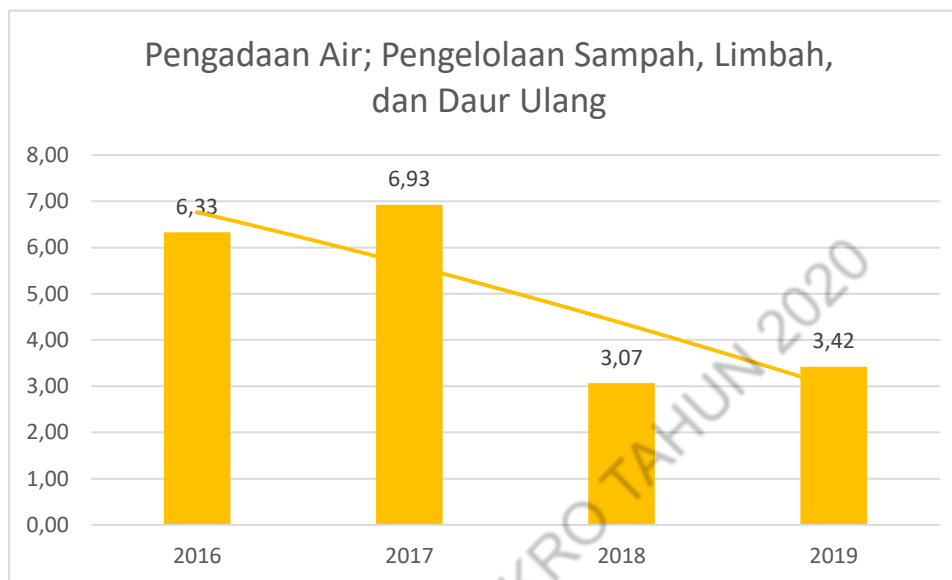
Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kota Tebing Tinggi selama tahun 2012-2019 relatif tidak mengalami perubahan, yaitu hanya sebesar 0,21 persen mulai tahun 2012 -2014 dan sedikit meningkat pada tahun 2015 sebesar 0,22 persen dan meningkat lagi pada tahun 2016 sebesar 0,24 persen serta 0,25 persen tahun 2017 dan 0,24 persen ditahun 2018, 0,23 persen ditahun 2019. Sedangkan laju pertumbuhannya di atas 5 persen, yaitu sebesar 8,52 persen, 8,32 persen, 8,29 persen, 8,33 persen, 8,63 persen, 8,99 persen, dan 6,94 persen berturut-turut untuk tahun 2011-2017 (Tabel 5.19).

Tabel 6.12 Kontribusi Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen), 2012-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,22	0,24	0,25	0,24	0,23
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.5 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2015 - 2019

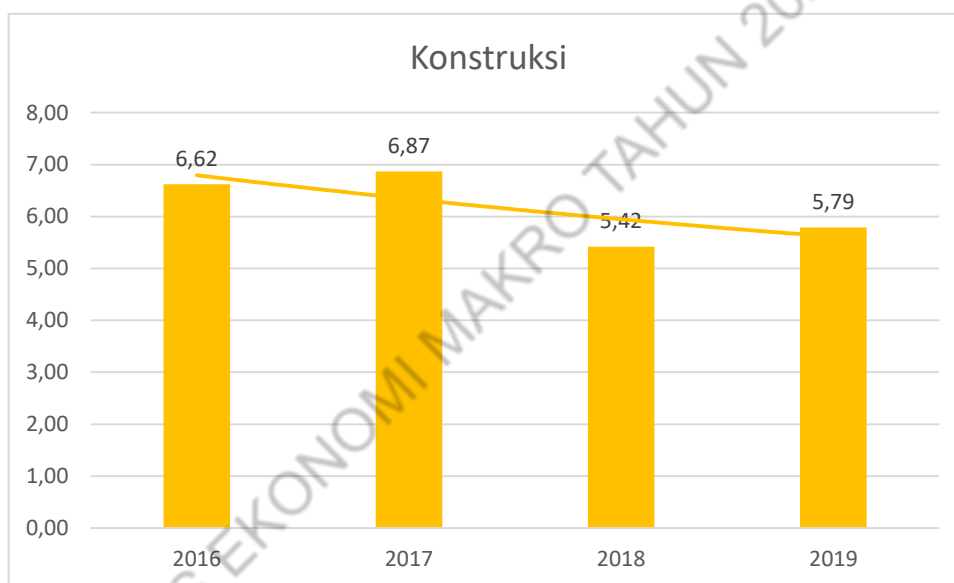
6. Konstruksi

Pada tahun 2017 kategori konstruksi menyumbang sebesar 14,45 persen terhadap total perekonomian Kota Tebing Tinggi meningkat dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 13,88 persen. Tren peningkatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada antara tahun 2015-2019 yaitu sebesar berturut-turut 14,20 persen, 14,19 persen, 14,45 persen, 14,76 persen dan 14,94 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan pertumbuhan dari 5,42 persen pada tahun 2018 menjadi 5,79 persen pada tahun 2019.

Tabel 6.13 Kontribusi Kategori Konstruksi terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen), Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konstruksi	14,2	14,19	14,45	14,76	14,94
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.6 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi Tahun 2015 - 2019

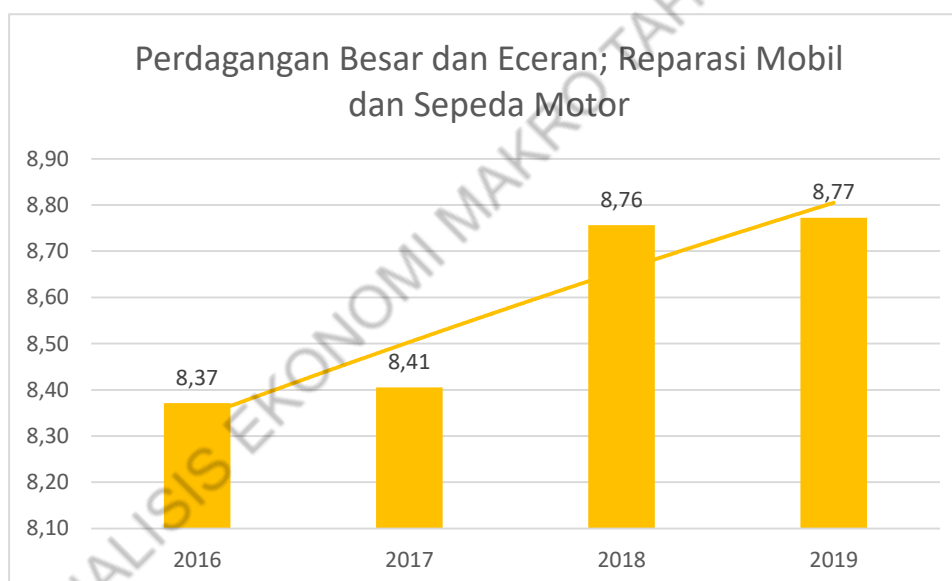
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 18 persen dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi. Pada tahun 2017, kontribusi kategori ini sebesar 21,98 persen, meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 21,51 persen, dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 22,73 persen dan 23,72 persen pada tahun 2019

Tabel 6.14 Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,7	21,51	21,98	22,73	23,72
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.7 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2015 - 2019

Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2015- 2019 rata-rata di atas 7 persen, di mana pada tahun 2019 mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 8,7 persen.

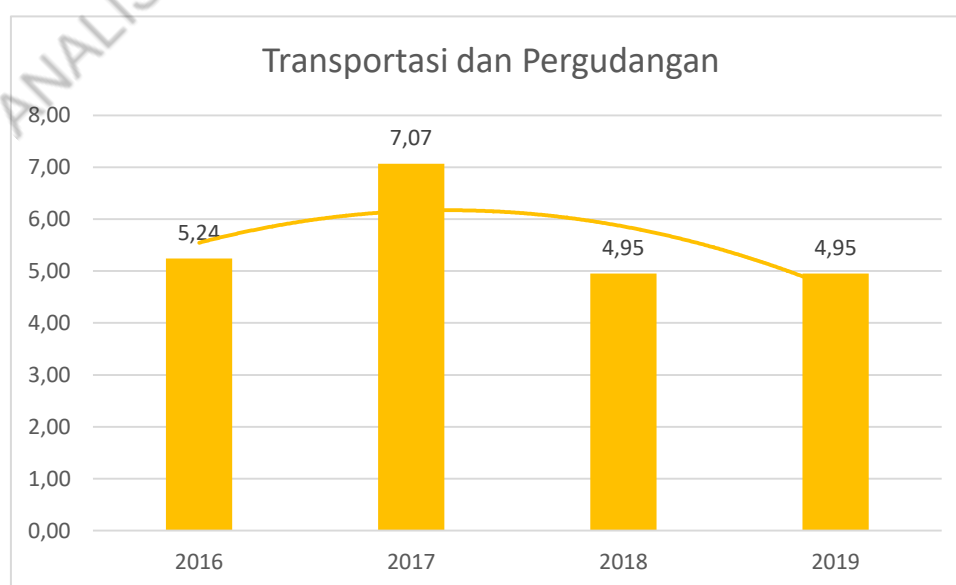
8. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kontribusi Kategori ini pada tahun 2018 sebesar 7,98 persen, dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 7,95 persen .

Tabel 6.15 Kontribusi Kategori Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2012-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Transportasi dan Pergudangan	7,9	8,01	8,07	7,98	7,95
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.8 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Tahun 2015- 2019

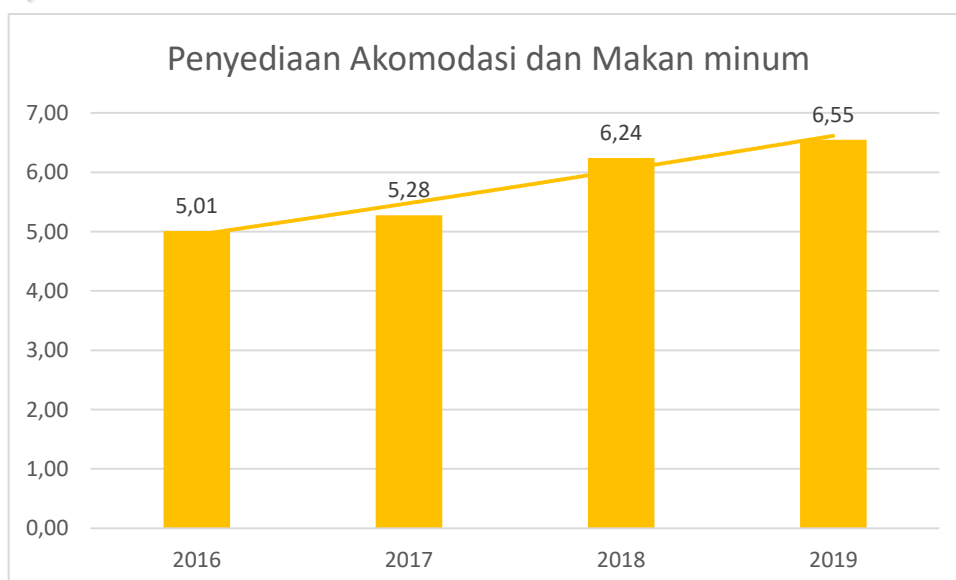
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2019, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi sebesar 4,14 persen, meningkat 0,1 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif rata-rata sebesar 5,77 persen selama 5 tahun terakhir ini,

Tabel 6.16 Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2012-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,27	4,15	4,15	4,13	4,14
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.9 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2015- 2019

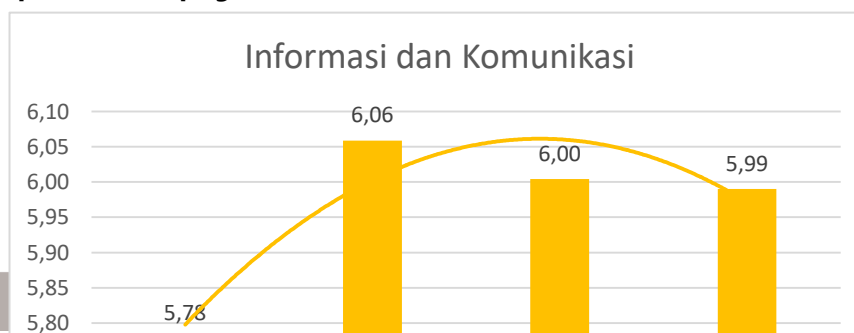
10. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kota Tebing Tinggi selama tahun 2015-2019 sebesar 1,92 persen, 1,88 persen, 1,89 persen, 1,89 persen, 1,91 persen, Sedangkan laju pertumbuhannya menunjukkan fluktuasi, yaitu sebesar 5,73 persen, 6,06 persen, 6,0 persen, 5,99 persen, berturut-turut untuk tahun 2015-2019.

Tabel 6.17 Kontribusi Kategori Informasi dan Komunikasi terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Informasi dan Komunikasi	1,92	1,88	1,89	1,89	1,91
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.10 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi Tahun 2015- 2019

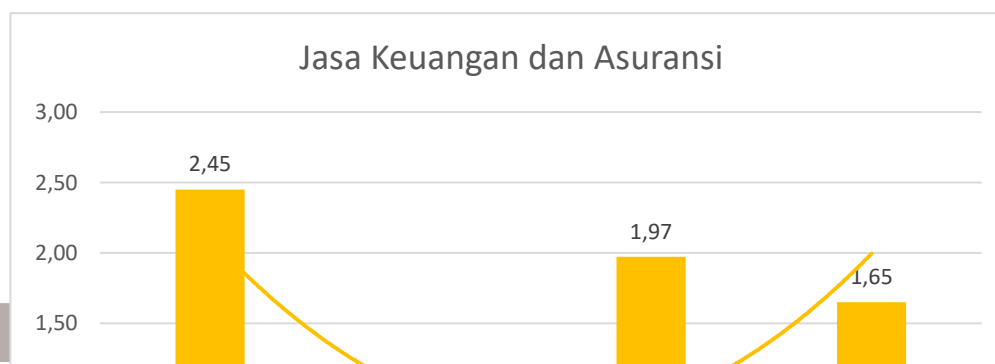
11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada kategori jasa keuangan dan asuransi ini memberikan kontribusi perekonomian pada PDRB Kota Tebing Tinggi sebesar 5,56 persen pada tahun 2016, namun menurun pada tahun 2019 yakni 4,95 persen. Sedangkan laju pertumbuhan kategori ini selama tahun 2011-2013 mengalami percepatan yaitu sebesar 6,33 persen, 7,44 persen dan 7,62 persen. Tetapi pada tahun 2014-2016 mengalami perlambatan sebesar 3,89 persen, 3,22 persen, dan 2,57 persen.

Tabel 6.18 Kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,81	5,56	5,31	5,18	4,95
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.11 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2015- 2019

12. Real Estat

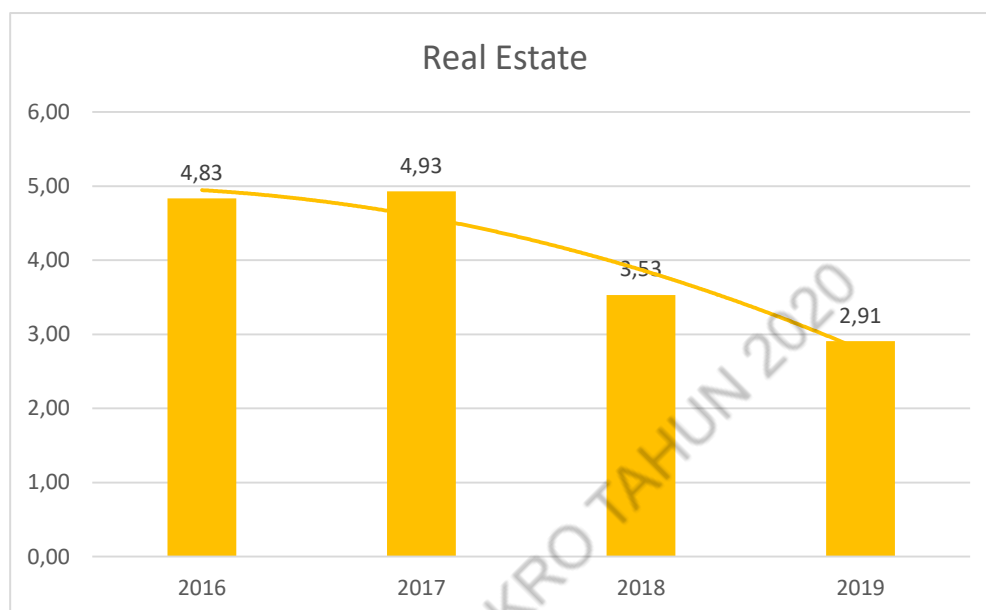
Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kota Tebing Tinggi dengan peranan sebesar lebih dari 8 persen dengan trend menurun dari tahun 2015 sebesar 8,31 persen menjadi sebesar 8,30 persen tahun 2019. Selama tahun 2015-2019, secara berturut-turut sumbangan kategori real estat sebesar 8,31 persen, 8,36 persen, 8,32 persen, 8,33 persen, dan 8,30 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini mengalami fluktuasi antara tahun 2015-2019, namun mengalami penurunan sejak tahun 2018 yakni sebesar 3,53 persen menurun menjadi 2,91 persen pada tahun 2019

Tabel 6.19 Kontribusi Kategori Real Estat terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Real Estat	8,31	8,36	8,32	8,33	8,30
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.12 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estat Tahun 2015- 2019

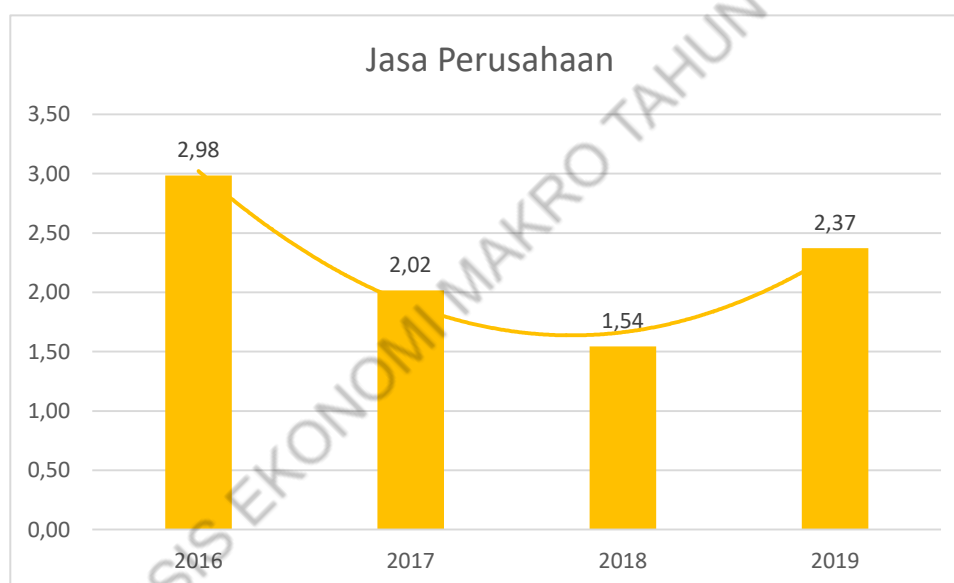
13. Jasa Perusahaan

Selama 8 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu antara kisaran 0,47 persen – 0,50 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kota Tebing Tinggi. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami perlambatan dari 1,54 persen pada tahun 2018 menjadi 2,37 persen pada tahun 2019

Tabel 6.20 Kontribusi Kategori Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2012-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa Perusahaan	0,49	0,5	0,48	0,46	0,45
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.13 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Tahun 2015- 2019

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

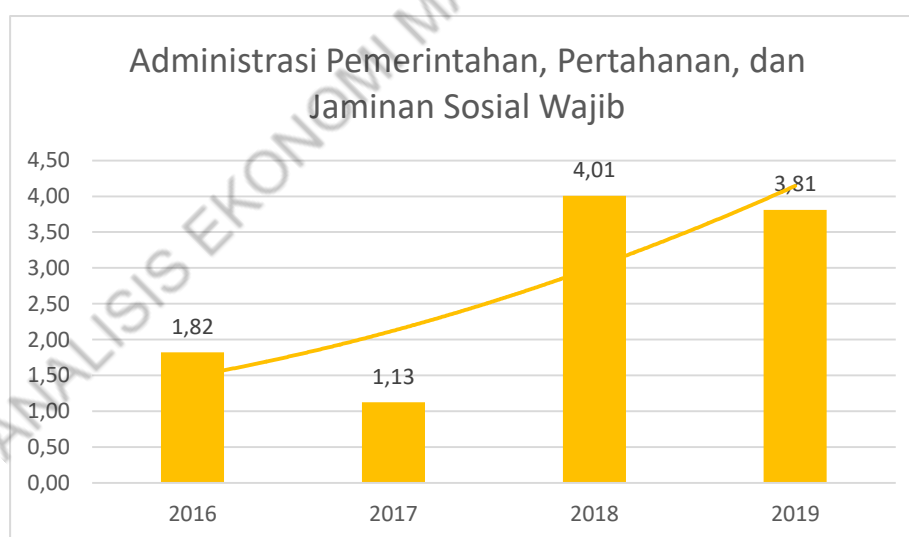
Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2015-

2019 peranannya antara 11 persen sampai dengan 12 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan tren menurun, yaitu dari sebesar 1,13 persen di tahun 2017, namun naik kembali pada tahun 2018 sebesar 4,01 persen namun menurun menjadi 3,81 persen pada tahun 2019.

Tabel 6.21 Kontribusi Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,28	12,27	11,93	11,61	11,33
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.14 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Tahun 2015- 2019

15. Jasa Pendidikan

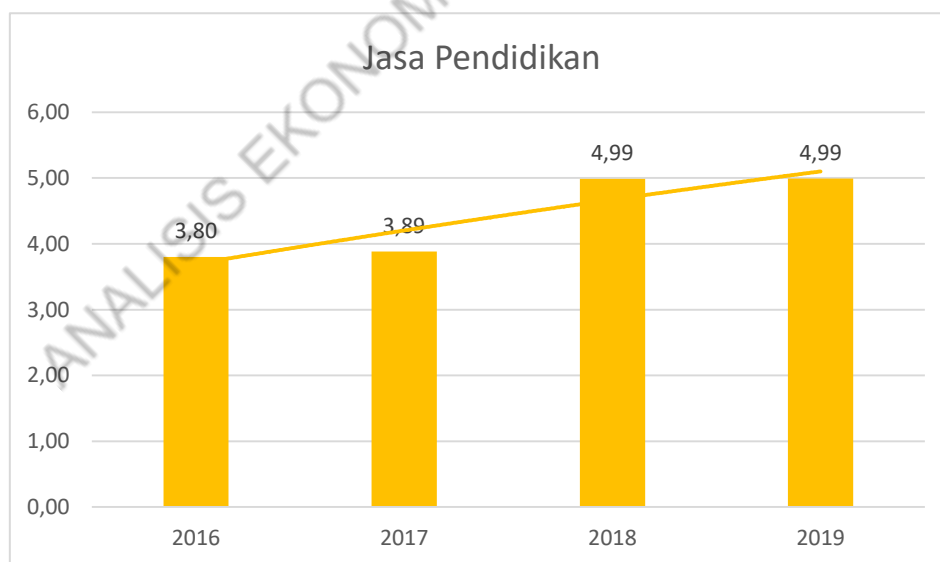
Pada tahun 2019 jasa pendidikan menyumbang sebesar 6,24 persen terhadap total perekonomian Kota Tebing Tinggi sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 6,57 persen. Tren

percepatan kontribusi kategori ini juga terlihat pada tahun 2015-2019 yaitu sebesar berturut-turut 6,66 persen, 6,57 persen, 6,26 persen, 6,24 persen, dan 6,24 persen pada tahun 2019. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Tebing Tinggi mengalami perlambatan dari 6,44 persen pada tahun 2011 menjadi 3,89 persen pada tahun 2017, namun naik kembali sebesar 5 persen pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel 6.22 Kontribusi Kategori Jasa Pendidikan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa Pendidikan	6,66	6,57	6,26	6,24	6,24
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.15 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Tahun 2015- 2019

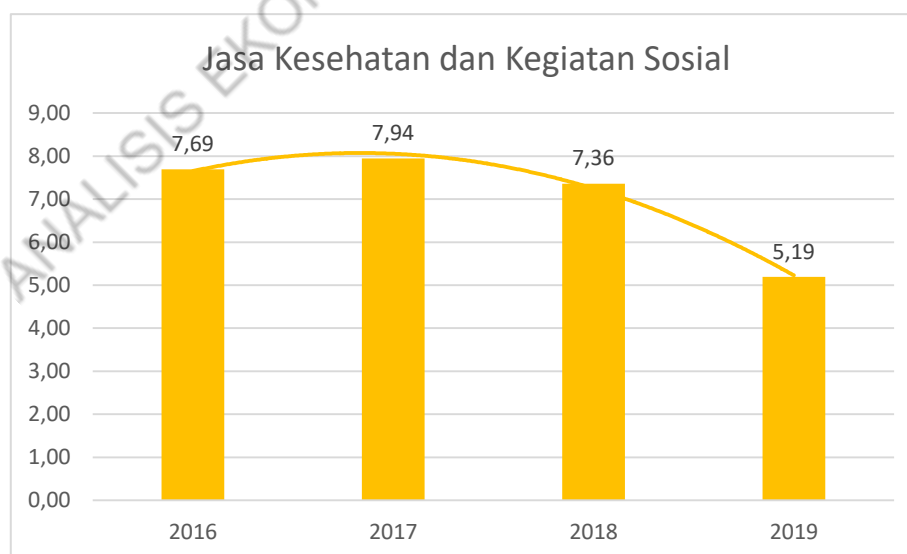
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2019, kontribusinya terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi sebesar 1,016 persen. Selama tahun 2015-2019 peranannya relatif stabil antara kisaran 1,06 persen – 1,16 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya menunjukkan perlambatan di mana pada tahun 2016 sebesar 7,69 persen menjadi sebesar 7,94 persen pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.23 Kontribusi Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen) Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,08	1,06	1,15	1,16
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.16 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Tahun 2015- 2019

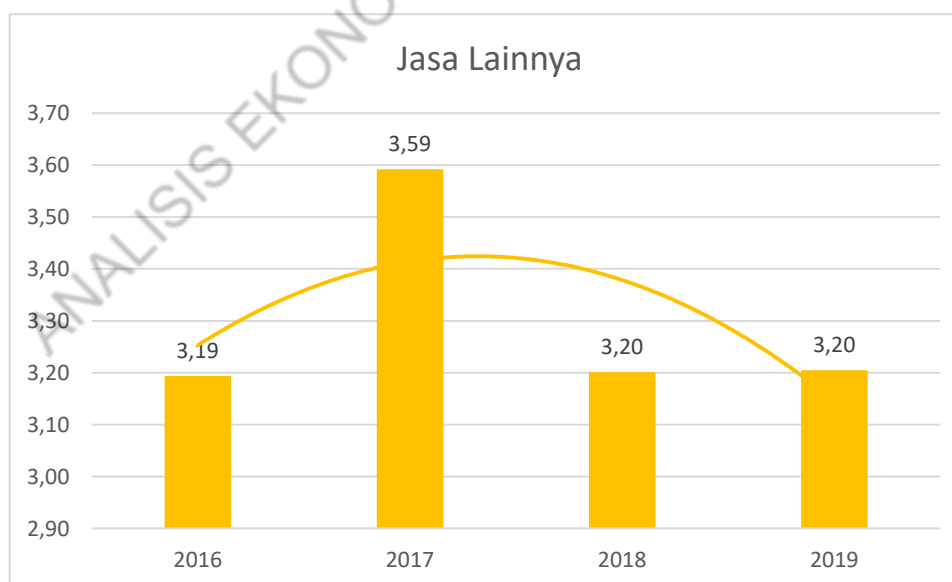
17. Jasa Lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi relatif kecil dan cenderung melambat dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu sebesar 1 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 3,59 persen, namun menurun menjadi 3,20 persen pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 6.24 Kontribusi Kategori Jasa Lainnya terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi (persen), 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa Lainnya	1,00	0,98	0,94	0,92	0,89
PDRB atas Dasar Harga Berlaku	100	100	100	100	100

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.17 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya Tahun 2015- 2019

6.5 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB di estimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008.

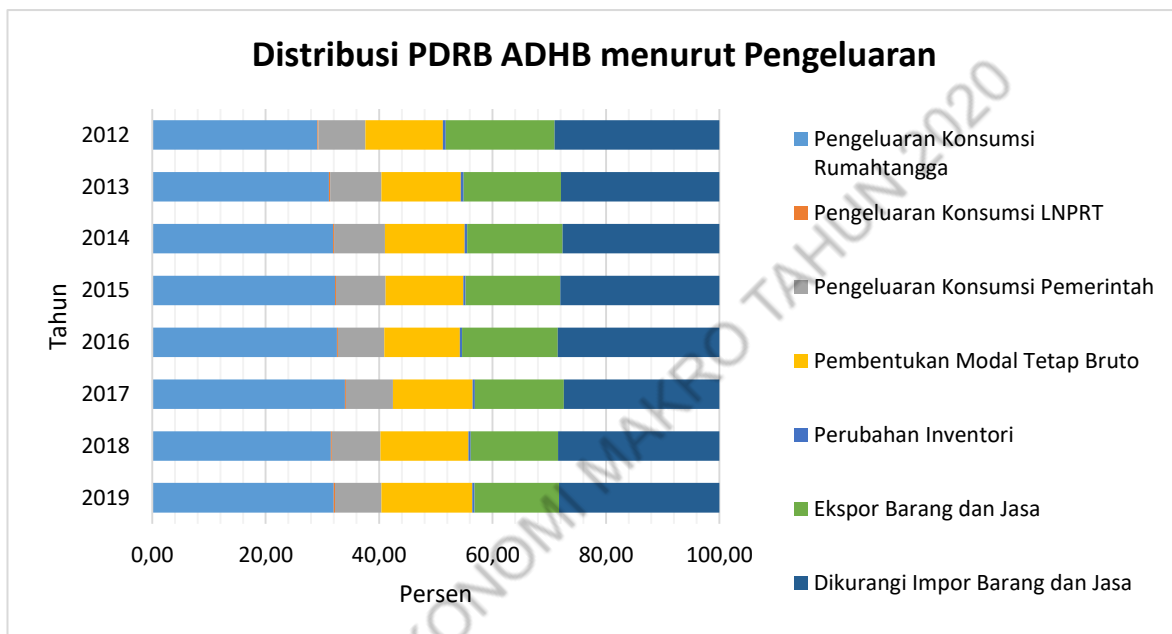
Meskipun mengalami penurunan laju pertumbuhan sejak tahun 2012, namun PDRB Kota Tebing Tinggi masih dapat tumbuh di atas 4 %. Adapun laju pertumbuhan ekonomi PDRB Kota Tebing Tinggi ADHB menurut pengeluaran 2012-2019 adalah 14,26%; 11,33%; 9,61%; 10,27%; 8,33%; 7,55%; 7,46%. Penurunan laju pertumbuhan ini disebabkan meningkatnya pengeluaran pada semua sektor tiap tahun mulai dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, serta ekspor barang dan jasa.

Tabel 6.25 PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2019

Pengeluaran	PDRB Kota Tebing Tinggi ADHB menurut Pengeluaran, 2010-2017 (Juta Rupiah)				
	2019	2018	2017	2016	2015
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	4.359.984,36	4.027.799,87	3.853.618,12	3.578.521,63	3.146.093,85
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	28.183,79	25.546,54	17.816,92	17.420,01	16.657,01
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.115.194,88	1.095.195,32	945.952,64	904.751,40	856.550,55
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.184.191,21	1.990.103,23	1.594.577,59	1.464.052,75	1.338.828,50

Perubahan Inventori	51.420,14	48.850,95	42.929,89	43.730,99	41.529,99
Ekspor Barang dan Jasa	2.033.283,88	1.968.157,63	1.780.598,95	1.853.598,95	1.630.598,95
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3.848.058,90	3.643.136,32	3.112.278,25	3.132.897,22	2.741.894,73
Produk Domestik Regional Bruto	5.924.199,36	5.512.517,22	5.123.215,86	4.729.178,51	4.288.364,13

Sumber : Kota Tebing Tinggi dalam Angka, 2020



Gambar 6.18 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran

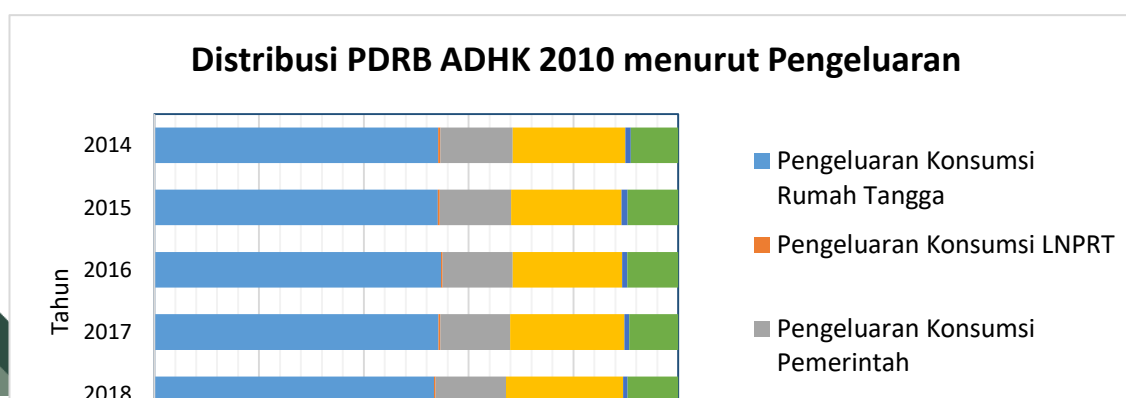
Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang devaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga

Konstan 2010 Kota Tebing Tinggi pada periode 2012-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 6.26 PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kota Tebing Tinggi Tahun 2015-2019 (juta rupiah)

Pengeluaran	PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 menurut Pengeluaran, 2015-2019				
	2019	2018	2017	2016	2015
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.616.630,23	2.485.913,74	2.386.760,53	2.310.499,08	2.169.593,16
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	17.579,57	16.048,16	15.257,18	14.963,25	14.703,25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	625.956,60	624.135,80	585.942,43	564.127,69	545.312,95
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.138.603,19	1.042.439,95	959.646,15	882.954,96	844.754,27
Perubahan Inventori	41.748,91	40.412,39	39.501,43	39.548,09	47.294,75
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-486.492,87	-448.445,52	-411.602,50	-411.343,89	-386.358,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.954.025,63	3.760.504,52	3.575.505,22	3.400.749,17	3.235.299,89

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.



Gambar 6.19 Distribusi PDRB ADHK Menurut Pengeluaran

Dari tabel di atas, terlihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran di Kota Tebing tinggi meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2012-2019. PDRB yang sebelumnya 2.758,87 miliar Rupiah (2012) menjadi 3.953,02 miliar Rupiah (2019). Hal ini disebabkan oleh pengeluaran yang juga meningkat tiap tahun, mulai dari pengeluaran rumah tangga hingga perubahan inventori.

Tabel 6.27 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2012-2019 (Persen)

Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 menurut Pengeluaran, 2012-2019 (Persen)							
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,26	4,15	7,12	6,44	6,28	5,97	5,85	8,19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,54	5,18	1,96	2,32	-0,50	2,46	3,28	3,60

Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 menurut Pengeluaran, 2012-2019 (Persen)							
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,29	6,52	3,87	1,23	6,18	5,57	4,76	5,86
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,22	8,63	5,24	4,55	4,01	3,71	2,83	3,44
Perubahan Inventori	3,31	2,31	-0,12	-16,38	21,08	3,47	2,89	2,48
Net Ekspor Barang dan Jasa	8,48	8,95	0,06	6,47	13,56	4,20	-4,11	13,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,15	5,17	5,14	5,11	4,90	5,45	6,01	5,75

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.

6.6 Pertumbuhan Ekonomi

Economic growth (pertumbuhan ekonomi) merupakan salah satu ukuran atau indikator keberhasilan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan sektor ekonomi yang terbentuk dari laju pertumbuhan akan memberikan gambaran tentang tingkat perubahan ekonomi pada suatu negara/wilayah/daerah yang terjadi, di mana pergerakan laju pertumbuhan ini merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan dimasa yang akan datang. Di samping digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi, angka ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana

aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduk.

Pertumbuhan ekonomi secara riil disajikan melalui PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang riil biasanya didasarkan atas dasar harga konstan yang umumnya digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur ekonomi rakyat secara keseluruhan dalam arti luas, yaitu berapa banyak barang riil dan jasa-jasa yang dihasilkan untuk keperluan konsumsi dan investasi penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan perekonomian dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan penurunan perekonomian.

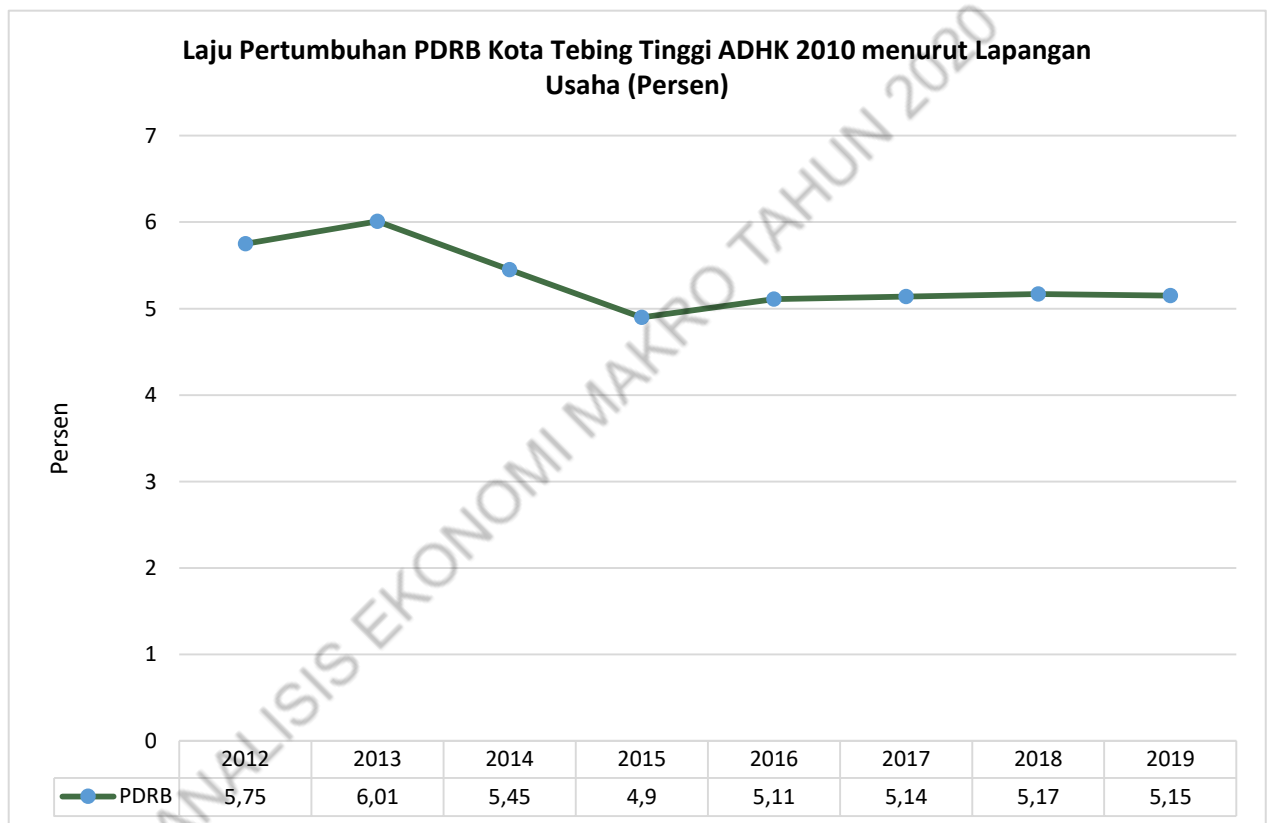
Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 yang dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan ekonomi pada ini mengalami penurunan sebanyak 0,02 persen. Hal ini disebabkan terjadinya juga penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, real Estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara peningkatan laju pertumbuhan PDRB terbesar dari kurun waktu 2018-2019 disumbang oleh sektor pengadaan listrik dan gas (5,40 persen), pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang (3,36 persen), konstruksi (5,79 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (8,77 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (6,55 persen), dan jasa perusahaan (2,34 persen). Selain peningkatan dan penurunan, terdapat juga sektor yang mengalami stagnasi pada laju pertumbuhan ekonominya, yaitu sektor transportasi dan pergudangan 4,85 persen.

**Tabel 6.28 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-
2013**

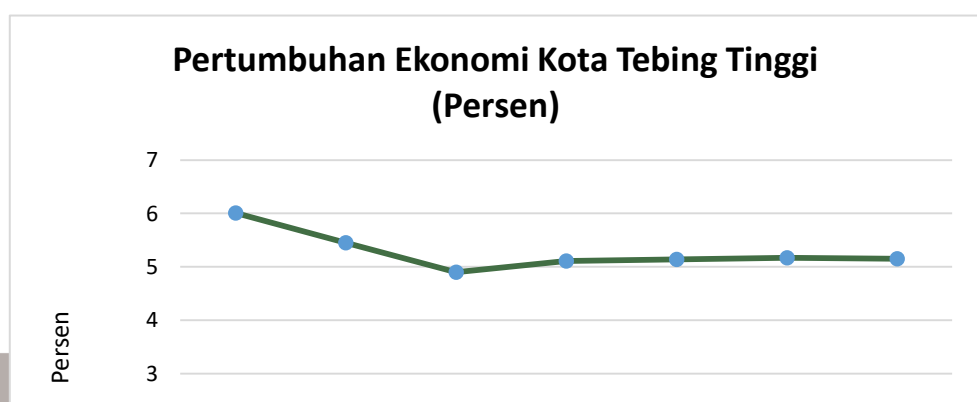
Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)						
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,38	4,09	4.58	4.59	5.29	1.17	3.05
Pertambangan dan Penggalan	2,24	3,40	5.07	3.95	4.10	4.46	5.08
Industri Pengolahan	1,79	2,06	2.65	2.97	-1.69	0.40	3.12
Pengadaan Listrik dan Gas	5,40	2,95	4.35	3.40	8.23	8.77	4.43
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,36	3,08	6.94	8.99	8.63	8.33	8.29
Konstruksi	5,79	5,42	6.87	6.55	6.04	6.29	6.94
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,77	8,76	8.40	8.05	7.53	8.84	6.71
Transportasi dan Pergudangan	4,95	4,95	7.07	6.66	6.51	6.82	7.70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,55	6,24	5.27	5.02	4.96	4.82	4.54
Informasi dan Komunikasi	6,00	6,00	6.07	5.78	5.22	5.13	7.11
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,98	-0.06	2.57	3.22	3.89	7.62
Real Estate	2,91	3,53	4.93	4.83	4.45	4.39	5.18
Jasa Perusahaan	2,34	1,54	2.03	2.96	2.07	3.86	7.05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,81	4,01	1.13	1.82	7.71	7.57	6.74
Jasa Pendidikan	4,99	4,99	3.89	3.80	4.11	4.37	6.79

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)						
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,19	7,35	7.94	3.64	7.62	7.50	6.79
Jasa Lainnya	3,21	3,21	3.60	3.18	3.32	4.62	5.68
PDRB	5,15	5,17	5.14	5.11	4.90	5.45	6.01

Sumber : Kota Tebing Tinggi dalam Angka, 2020



Gambar 6.20 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2013- 2019



Gambar 6.21 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2013- 2019

6.7 PDRB Per kapita

PDRB merupakan salah satu indikator pembangunan yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas. Tinggi rendahnya PDRB per kapita atau kadang disebut sebagai pendapatan per kapita suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu besaran PDRB yang dihasilkan suatu daerah dan jumlah penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi per kapita juga dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk memacu kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan output pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduknya.

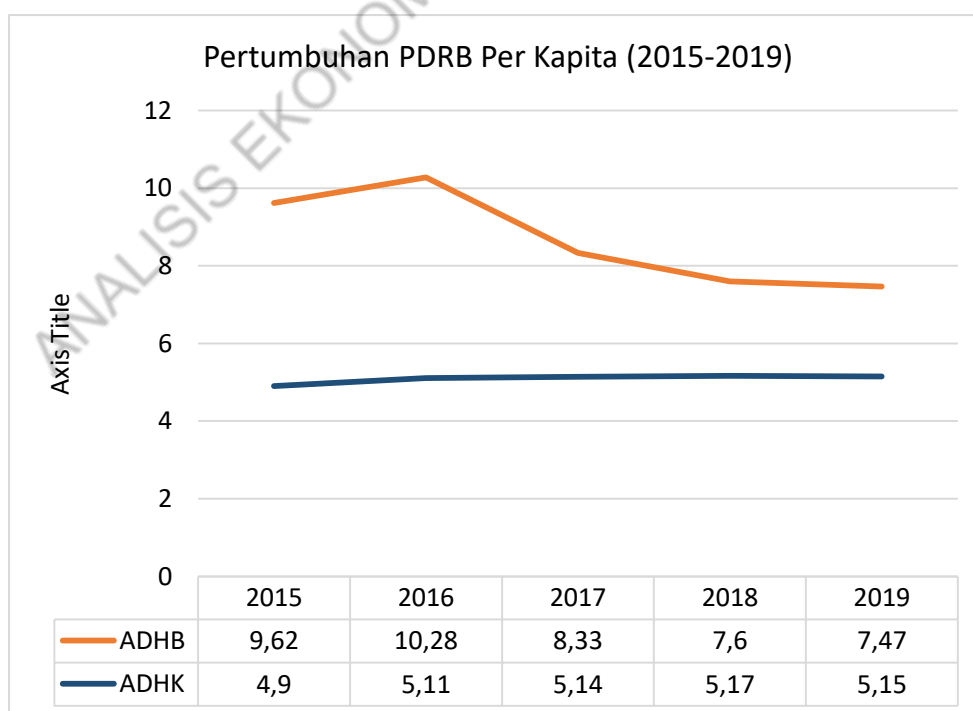
PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Kinerja ekonomi yang tercipta di Kota Tebing Tinggi dibagikan dengan seluruh penduduk, maka akan diperoleh rata-rata pendapatan setiap penduduk Kota Tebing Tinggi selama setahun. Secara tidak langsung PDRB per kapita menggambarkan tingkat kemakmuran pada suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota). Dikatakan tingkat kemakmuran wilayah karena belum memperhitungkan komponen-komponen lain, seperti: penyusutan,

pajak tidak langsung neto, dan pendapatan neto yang mengalir dari dan ke daerah lain.

Tabel 6.29 PDRB Per kapita Kota Tebing Tinggi Tahun 2015-2019

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	PDRB Per kapita (Miliar Rp)	Pertumbuhan %	PDRB Per kapita (Miliar Rp)	Pertumbuhan %
2015	4.287,86	9,62	3.235,30	4,90
2016	4.725,48	10,28	3.400,75	5,11
2017	5.123,02	8,33	3.575,51	5,14
2018	5.512,52	7,60	3.760,50	5,17
2019	5.924,20	7,47	3.954,03	5,15

Sumber : Kota Tebing Tinggi dalam Angka, 2020



Gambar 6.22 Pertumbuhan PDRB Per Kapita 2015-2019

Dalam beberapa tahun terakhir di Kota Tebing Tinggi terjadi proses perbaikan ekonomi. Kendatipun demikian angka PDRB per kapita tersebut belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan masyarakat di setiap strata ekonomi (kelas ekonomi). Pendapatan PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2015-2019, meskipun laju pertumbuhannya fluktuatif. Pada tahun 2015-2015 pertumbuhan PDRB per kapita cukup tinggi yaitu 0,66 persen. Sementara pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB mengalami penurunan 1,95 persen. Penurunan laju pertumbuhan ini terus dialami Kota Tebing tinggi sejak 2017 hingga tahun 2019.

Sama halnya dengan dari PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku yang nilai PDRB (miliar Rp) terus meningkat, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 di Kota Tebing Tinggi juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Begitu juga dengan pertumbuhan PDRB ADHK di kota ini cenderung meningkat setiap tahun, penurunan hanya terjadi pada tahun 2018-2019. Penurunan pertumbuhan PDRB tahun 2019 senilai 0,05 persen.

6.8 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dari data pada tabel 5.37 menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kota Tebing Tinggi kurun waktu tahun 2016-2019 mengalami peningkatan,

di mana pada tahun 2016 garis kemiskinan Rp. 383.650 meningkat menjadi Rp. 460.533 pada tahun 2019. Meskipun begitu, garis kemiskinan di Kota Tebing Tinggi masih berada di bawah garis kemiskinan Sumatera Utara. Selanjutnya jumlah penduduk miskin Kota Tebing Tinggi tahun 2019 sebanyak 16.300 jiwa atau sebanyak 9,94 persen dari jumlah penduduk. Angka persentase jumlah penduduk miskin ini lebih besar dari Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 6.30 Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa), dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi (Persen)

Kabupaten Kota	Garis Kemiskinan (Rp)				Jumlah Penduduk Miskin (000) (Jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (Persen)	
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Sumatera Utara	388.156	411.345	435.970	466.122	1324,98	1282,04	9,22	8,83
Tebing Tinggi	383.650	415.307	426.469	460.533	16,64	16,30	10,27	9,94

Sumber : Kota Tebing Tinggi dalam Angka, 2020

6.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki

pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Data menunjukkan bahwa IPM Kota Tebing Tinggi kurun waktu tahun 2012-2019 cenderung mengalami peningkatan, di mana IPM tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan IPM sebesar 75,08. Jika dibandingkan dengan IPM Sumatera Utara, IPM Kota Tebing Tinggi masih lebih tinggi di banding provinsi Sumatera Utara.

Tabel 6.31 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2012-2019

Kabupaten Kota	Indeks Pembangunan Manusia							
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Sumatera Utara	61,65	71,18	70,57	70	69,51	68,87	68,36	67,74
Tebing Tinggi	75,08	74,5	73,9	73,58	72,81	72,13	71,85	71,34

Sumber: BPS Sumatera Utara

Jika dianalisis lebih detail lagi terkait dengan komponen-komponen dalam penentuan IPM, seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Pengeluaran Per kapita, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan bahwa untuk komponen AHH di Kota Tebing Tinggi tahun 2019 adalah 70,76 tahun, hari lama sekolah pada tahun 2019 adalah 12,71 tahun, rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 adalah 10,28 tahun sementara pengeluaran per kapita pada tahun 2019 adalah 12.895 (ribu rupiah).

Jika dibandingkan dengan provinsi Sumatera Utara, angka harapan hidup dan rata lama sekolah serta pengeluaran per kapita di Kota Tebing Tinggi masih lebih tinggi daripada provinsi Sumatera Utara. Rata lama sekolah ini menunjukkan bahwa, secara dominan masyarakat Kota Tebing Tinggi sudah mengenyam pendidikan hingga SMA dan sebagian melanjutkan perguruan tinggi.

**Tabel 6.32 Komponen IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2019**

Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran Per kapita (Ribu Rupiah)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Sumatera Utara	68,61	68,95	13,14	13,15	9,34	9,45	10,39	10,64
Nias	69,43	69,68	12,13	12,39	4,94	5,15	6,94	7,04
Mandailing Natal	62,24	62,51	13,15	13,17	8,11	8,36	9,65	9,90
Tapanuli Selatan	64,55	64,82	13,1	13,12	8,7	8,97	11,20	11,41
Tapanuli Tengah	66,82	67,08	12,66	12,79	8,29	8,48	10,06	10,17
Tapanuli Utara	68,11	68,46	13,66	13,68	9,65	9,71	11,60	11,79
Toba Samosir	69,59	69,93	13,26	13,28	10,34	10,36	12,09	12,37
Labuhan Batu	69,6	69,86	12,6	12,67	9,04	9,23	11,05	11,19
Asahan	67,79	68,11	12,56	12,59	8,47	8,49	10,73	10,98

Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran Per kapita (Ribu Rupiah)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Simalungun	70,75	71,07	12,75	12,77	9,18	9,36	11,31	11,42
Dairi	68,41	68,79	13,07	13,09	9,15	9,34	10,49	10,60
Karo	70,97	71,27	12,73	12,75	9,55	9,62	12,36	12,47
Deli Serdang	71,31	71,61	13,32	13,34	9,92	10,08	12,13	12,31
Langkat	68,22	68,59	12,75	12,81	8,52	8,64	11,08	11,20
Nias Selatan	68,24	68,58	12,2	12,22	5,2	5,53	6,94	7,10
Humbang Hasundutan	68,69	69,06	13,25	13,27	9,28	9,53	7,63	7,90
Pakpak Bharat	65,27	65,59	13,83	13,85	8,48	8,73	8,09	8,40
Samosir	70,87	71,16	13,44	13,46	9,14	9,15	8,34	8,65
Serdang Bedagai	68,08	68,46	12,57	12,59	8,51	8,53	10,73	11,06
Batu Bara	66,38	66,75	12,52	12,62	7,84	8,02	10,38	10,57
Padang Lawas Utara	66,77	67,06	12,42	12,47	9,06	9,10	9,91	10,19
Padang Lawas	66,69	66,98	13	13,02	8,67	8,69	8,77	9,10
Labuhanbatu Selatan	68,39	68,64	12,97	12,99	8,71	8,74	11,28	11,55
Labuhanbatu Utara	69,09	69,37	12,8	12,82	8,35	8,36	11,73	11,95
Nias Utara	68,98	69,29	12,58	12,78	6,09	6,25	6,04	6,24
Nias Barat	68,5	68,82	12,66	12,71	6,00	6,14	5,81	6,00
Sibolga	68,36	68,77	13,13	13,15	9,91	10,18	11,40	11,65
Tanjungbalai	62,6	63,02	12,47	12,49	9,24	9,26	11,10	11,38
Pematangsiantar	72,93	73,33	14,02	14,21	11,08	11,15	12,29	12,57
Tebing Tinggi	70,47	70,76	12,68	12,71	10,24	10,28	12,43	12,89
Medan	72,64	72,98	14,72	14,73	11,37	11,38	14,84	15,03
Binjai	71,95	72,25	13,59	13,61	10,75	10,77	10,75	11,26
Padangsidempuan	68,73	69,15	14,51	14,53	10,63	10,70	10,79	11,18

Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran Per kapita (Ribu Rupiah)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Gunungsitoli	70,67	71,02	13,71	13,73	8,41	8,58	7,63	8,05

Sumber: <https://sumut.bps.go.id/>, data diolah.

ANALISIS EKONOMI MAKRO TAHUN 2020

BAB VII

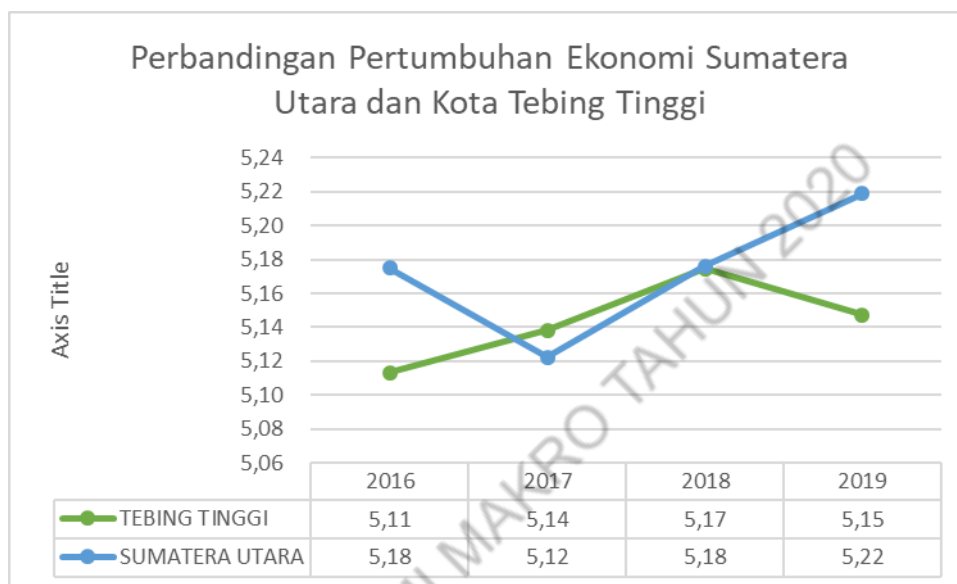
HASIL PROYEKSI DAN ANALISIS

7.1 Kondisi Ekonomi Kota Tebing Tinggi

7.1.1 Perbandingan PDRB Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi

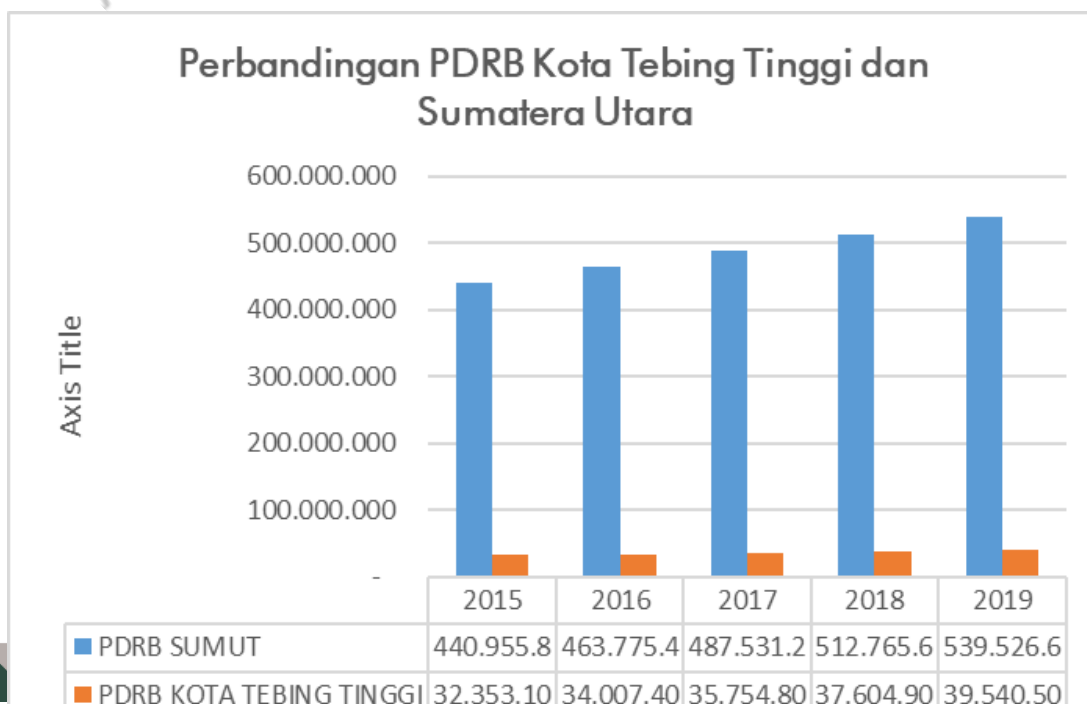
Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian di suatu wilayah secara riil. Laju pertumbuhan ekonomi adalah penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah

dalam kurun waktu tertentu. Jika dilihat dari Gambar di bawah ini terlihat bahwa baik pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara maupun pertumbuhan Kota Tebing Tinggi pada tahun 2017/2018 mengalami sedikit percepatan, namun pada tahun 2018/2019, dan 2019/2020 di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara walaupun tidak beda jauh.



Gambar 7.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi dan Sumatera Utara

Sementara untuk perbandingan antara nilai PDRB dari sisi pendapatan antara Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara dapat diketahui bahwa Kota Tebing Tinggi memberikan kontribusi terhadap PDRB Sumatera Utara adalah sebesar 7% saja



Gambar 7.2 Perbandingan Share PDRB Kota Tebing Tinggi dan Sumatera Utara

7.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi

Kinerja ekonomi Kota Tebing Tinggi dilihat dari nilai PDRB harga konstan tahun 2010 pada tahun 2016-2019 cenderung mengalami kenaikan di beberapa sektor, dan mengalami kenaikan yang memberikan pertumbuhan yang cukup besar adalah sektor perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, laju angka pertumbuhannya berada di 8,37% pada tahun 2016 dan 8,77% ditahun 2019.

Laju pertumbuhan yang terjadi diakibatkan peningkatan kontribusi per sektor mengakibatkan semua sektor mengalami peningkatan kecuali sektor jasa keuangan pada tahun 2017 hingga laju pertumbuhannya -0,06, dan laju pertumbuhannya juga kecil, hal ini bisa saja terjadi karena secara spasial penyaluran kredit bank umum di Sumatera Utara masih terkonsentrasi hanya di 5 Kabupaten/Kota saja, seperti Medan, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, dan Pematangsiantar yang lebih banyak mendominasi pasar. Hal ini bisa saja mengakibatkan laju pertumbuhan Kota Tebing Tinggi pada sektor jasa keuangan dan asuransi relatif rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 7.1 Perkembangan Nilai PDRB ADHK 2020 Menurut Lapangan Usaha, 2016-2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,56	4,58	4,09	3,39
B	Pertambangan dan Penggalian	4,34	5,03	3,47	2,23
C	Industri Pengolahan	3,00	2,65	2,06	1,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,44	4,38	2,89	5,49

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,33	6,93	3,07	3,42
F	Konstruksi	6,62	6,87	5,42	5,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,37	8,41	8,76	8,77
H	Transportasi dan Pergudangan	5,24	7,07	4,95	4,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	5,01	5,28	6,24	6,55
J	Informasi dan Komunikasi	5,78	6,06	6,00	5,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,45	-0,06	1,97	1,65
L	<i>Real Estate</i>	4,83	4,93	3,53	2,91
M,N	Jasa Perusahaan	2,98	2,02	1,54	2,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,82	1,13	4,01	3,81
P	Jasa Pendidikan	3,80	3,89	4,99	4,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,69	7,94	7,36	5,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,19	3,59	3,20	3,20
Produk Domestik Regional Bruto		5,11	5,14	5,17	5,15

Sumber: Hasil Analisis, 2020

7.1.3 Proyeksi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi 2020-2025 Trend Normal Per Sektor Lapangan Usaha

Proyeksi perekonomian Tebing Tinggi pada tahun 2020-2025 dengan mempergunakan proyeksi moderate dengan menganggap faktor lain bersifat tetap, dengan memakai data dasar PDRB ADHK 2015-2019 asumsi dasar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14 persen, diketahui bahwa sektor yang akan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan nilai PDRB pada tahun 2024 adalah Rp. 1.409,85 Miliar Rupiah, pertumbuhan sektor ini merupakan salah satu pendorong utama percepatan meningkatnya daya beli masyarakat yang akan terus mendorong naiknya laju pertumbuhan konsumsi masyarakat yang semakin meningkat.

Sektor ini juga akan menjadi motor penggerak sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini juga membuktikan bahwa ke depannya Kota

Tebing Tinggi memperlihatkan kinerja yang baik sesuai dengan peran kota sebagai pusat pelayanan jasa

Gambar 7.3 Trend Proyeksi Nilai PDRB 2020-2025

Tabel 7.2 Proyeksi Perkembangan Nilai PDRB ADHK 2020-2024 Menurut Lapangan Usaha, 2016-2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	57,83	60,23	62,73	65,34	68,05
Pertambangan dan Penggalian	6,65	6,90	7,16	7,43	7,71
Industri Pengolahan	505,27	517,27	529,56	542,15	555,03
Pengadaan Listrik dan Gas	7,804	8,120	8,449	8,791	9,147
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,84	10,33	10,84	11,37	11,93
Konstruksi	633,56	672,67	714,19	758,28	805,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.014,45	1.101,45	1.195,92	1.298,49	1.409,85
Transportasi dan Pergudangan	338,16	356,94	376,76	397,69	419,77
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	190,90	201,91	213,56	225,88	238,91

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Informasi dan Komunikasi	110,24	116,81	123,77	131,14	138,95
Jasa Keuangan dan Asuransi	185,14	187,92	190,74	193,61	196,52
<i>Real Estate</i>	329,33	342,66	356,54	370,97	385,99
Jasa Perusahaan	17,22	17,60	17,99	18,39	18,80
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	410,19	421,24	432,57	444,22	456,18
Jasa Pendidikan	252,68	263,84	275,50	287,66	300,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52,08	55,75	59,67	63,88	68,38
Jasa Lainnya	41,25	42,61	44,01	45,46	46,96

Sumber: Hasil Analisis, 2020

7.1.4 Proyeksi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi 2020-2025 Akibat Virus Covid-19

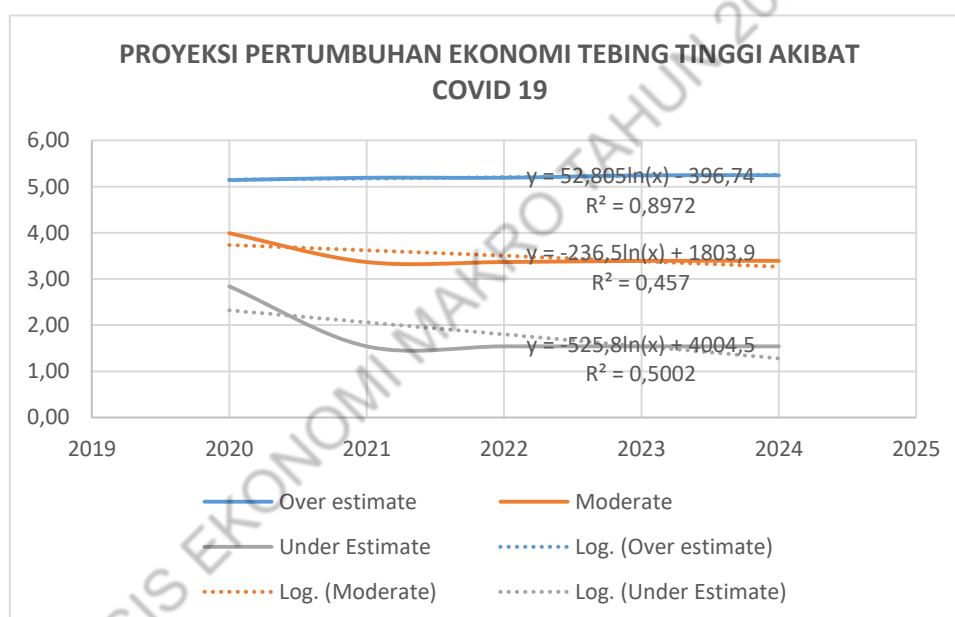
Perekonomian Tebing Tinggi diperkirakan terus mengalami penurunan hingga akhir tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya virus covid-19, mengingat Sumatera Utara menjadi daerah di Pulau Sumatera yang masuk pada lima besar daerah dengan jumlah orang berisiko tertinggi, yakni mencapai 9,6 juta orang.

Tren persebaran Covid-19 di Sumatera Utara mulai mengindikasikan kenaikan, sehingga hal ini menumbuhkan pesimisme pemulihan ekonomi pada tahun 2021, hal ini dikarenakan belum jelasnya kapan berakhirnya pandemi ini, maka perlu adanya pemulihan ekonomi yang didukung dengan berbagai stimulus ekonomi melalui kebijakan fiskal maupun moneter. *Estimate* pertumbuhan ekonomi lebih mengarah kepada *under estimate* yang akan berada di angka 1,54% saja sampai dengan tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada periode tersebut diperkirakan berada pada kisaran 1,54%. Untuk lebih jelas dapat dilihat melalui tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 7.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tebing Tinggi 2020-2025

Tahun	Over estimate	Moderate	Under Estimate
2020	5,14	3,99	2,84
2021	5,19	3,37	1,54
2022	5,19	3,37	1,54
2023	5,24	3,39	1,54
2024	5,24	3,39	1,54

Sumber: Hasil Analisis, 2020



Gambar 7.4 Regresi Pertumbuhan Ekonomi 2020-2025

7.2 Tingkat Inflasi

Tekanan inflasi Kota Tebing Tinggi pada akhir tahun 2024 menunjukkan akan ada faktor rendahnya permintaan yang mengakibatkan tekanan terhadap inflasi berkurang, hal ini dipengaruhi oleh langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19, yang menyebabkan aktivitas manusia lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB dan lain sebagainya. Meskipun demikian, inflasi yang terus rendah perlu diwaspadai

adanya penurunan permintaan, sehingga kebijakan perlu merespon perkembangan tersebut.

Dalam menjaga kelancaran distribusi di Sumatera Utara, TPID akan mendorong kerja sama perdagangan antar daerah. Pengembangannya diarahkan untuk membangun model bisnis kerja sama serta mengoptimalkan peran BUMD dan swasta hingga ke kabupaten/kota yang cukup jauh dari Kota Medan. Di samping itu, TPID akan terus meningkatkan infrastruktur perdagangan seperti pasar induk dan sarana konektivitas di Kota Tebing Tinggi. Salah satu program pengendalian inflasi adalah program unggulan pertanian di antaranya kluster bawang merah, dan kerja sama penjualan komoditas padi organik dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu TPID akan bekerja sama untuk mengembangkan kluster perikanan, bawang merah, dan cabai merah yang diharapkan akan berkontribusi dalam pengendalian inflasi.

Berdasarkan proyeksi dan dengan mempertimbangkan perkembangan harga serta determinan (faktor) utama inflasi di Sumatera Utara, Pematangsiantar, dan Medan serta Tebing Tinggi, maka diperkirakan inflasi tahunan akhir tahun ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4 Tingkat Inflasi Kota Tebing Tinggi

Komoditas	(%yoy)
Cabai merah	0,264
Minyak Goreng	0,183
Sewa Rumah	0,149
Rokok Putih	0,137
Bawang Merah	0,134

Sumber: Hasil Analisis, 2020

7.3 Perkiraan Investasi Daerah

Berdasarkan lapangan usaha pada periode 2014-2018 terdapat 4 (empat) lapangan usaha yang menyerap investasi di atas 10 persen dari total investasi yang ditanamkan di Kota Tebing Tinggi yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Mobil dan Sepeda Motor menyerap investasi sebesar 22,84 persen, Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 15,00 persen, Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 12,89 persen, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,23 persen, dan sisanya kurang dari 50 persen diserap oleh lapangan usaha lainnya yang ada di Kota Tebing Tinggi.

Jika dirinci berdasarkan kelompok industri, terlihat bahwa hampir 80 persen investasi di lapangan usaha industri pengolahan diserap oleh Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik. Selain itu sebesar 16,29 persen investasi industri juga diserap oleh Industri Makanan dan Minuman, sedangkan sisanya oleh industri pengolahan lainnya dengan persentase kurang dari 5 persen. Dengan adanya gambaran mengenai penyerapan investasi menurut lapangan usaha dan menurut kelompok industri diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi guna mengevaluasi kebijakan investasi serta perencanaannya di masa yang akan datang.

Investasi dalam kegiatan ekonomi mempunyai arti yang luas. Investasi selalu dikaitkan dengan kegiatan menanamkan uang atau modal dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan kapasitas produksi pada masa yang akan datang. Sebagai contoh menambah

kapasitas produksi dengan membeli mesin dan peralatan, meningkatkan kualitas sistem produksi, dan sebagainya.

Tabel 7.5 Perkembangan Nilai Investasi Kota Tebing Tinggi 2015-2019

Tahun	Harga Berlaku 2010			Harga Konstan 2010		
	PMTB	Δ Inventori	Jumlah	PMTB	Δ Inventori	Jumlah
2015	1.368,83	41,83	1.410,66	844,75	47,29	892,04
2016	1.488,06	41,73	1.529,79	882,95	39,55	922,50
2017	1.594,58	42,93	1.637,51	929,25	28,50	957,75
2018	1.819,10	61,35	1.880,45	1.009,44	35,91	1.045,35
2019	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Kota Tebing Tinggi dalam Angka, 2019

Nilai investasi yang di tanamkan di Kota Tebing Tinggi selama 2014-2018 atas dasar harga konstan 2010 dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan yang cukup besar. Nilai investasi yang ditanamkan pada awal tahun 2014 sebesar 848,52 milyar rupiah, naik menjadi 892,04 milyar rupiah di tahun 2015 kemudian naik lagi menjadi 922,50 milyar rupiah pada tahun 2016. Pada tahun 2017 investasi mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 957,75 milyar rupiah kemudian menaik lagi pada tahun 2018 menjadi 1.045,35 milyar rupiah. Sementara itu, besarnya porsi investasi dibandingkan dengan besarnya PDRB selama periode 2014-2018 berkisar antara 26-28 persen. Persentase investasi terkecil terjadi pada tahun 2017 ini yaitu sebesar 26,79 persen, sedangkan persentase investasi yang terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 27,80 persen.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi fisik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, yang dicerminkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga cenderung mengalami peningkatan selama periode 2014-2018. Secara umum pertumbuhan PMTB selama periode

tersebut rata-rata sebesar 5,29 persen. Adapun pertumbuhan investasi terendah tercatat pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,41 persen dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 9,15 persen.

Sedangkan data pada investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai Investasi dapat diketahui bahwa nilai investasi Kota Tebing Tinggi s/d triwulan III tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.089.090.653.153 triliun, nilai investasi terbesar ada pada sektor transportasi dan pergudangan yakni sebesar Rp. 2.034.901.123.882 triliun, serta pada sektor industri makanan yakni sebesar Rp. 11.342.419.126 miliar rupiah, investasi pada sektor pergudangan terbesar dikarenakan proyek jalan tol Medan-Tebing Tinggi yang didanai oleh APBN dengan bekerjasama oleh PT Utama Marga Waskita. Untuk lebih jelas mengenai grafik pada sektor investasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.6 Nilai Realisasi Investasi Kota Tebing Tinggi

Sektor	Triwulan III	s/d Triwulan II	s/d Triwulan III
industri Makanan	10.495.844.055	846.575.071	11.342.419.126
Industri Karet	209.000.000	525.500.000	734.500.000
Industri Lainnya	-	-	-
Perdagangan	3.862.902.437	1.659.550.000	5.522.452.437
Perhotelan dan restoran	2.000.000	820.000.000	822.000.000
Transportasi dan pergudangan	-	2.034.901.123.882	2.034.901.123.882
Jasa Lainnya	-	1.664.631.221	1.664.631.221
Listrik, Gas dan Air	-	34.103.526.492	34.103.526.492
Jumlah	14.569.746.492	2.074.520.906.666	2.089.090.653.158

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, 2020

7.4 Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata sering kali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Gini rasio merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk, untuk melihat karakteristik ketimpangan lainnya dapat menggunakan data PDRB per kapita sebagai proxy pendapatan per kapita.

Dibalik ukuran-ukuran keberhasilan dari kemajuan ekonomi yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir, masih terdapat penduduk miskin secara absolut yang relatif cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 dan 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, sebaliknya pada tahun 2016 dan 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2014, dengan Garis Kemiskinan sebesar Rp.342.964,- terdapat sekitar 17,20 ribu orang (11,08%) yang memiliki pengeluaran/pendapatan di bawah Garis Kemiskinan. Pada tahun 2015 dengan Garis Kemiskinan sebesar Rp.355.621,- terdapat sekitar 18,80 ribu orang (12,03%) yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Pada tahun 2016 dengan garis kemiskinan sebesar Rp.383.650,- terdapat sekitar 18,52 ribu orang (11,70%) yang memiliki pengeluaran/pendapatan di bawah Garis kemiskinan.

Sementara pada tahun 2017, dengan garis kemiskinan sebesar Rp.415.307,- terdapat sekitar 19,06 ribu orang (11,90%) yang memiliki pengeluaran/pendapatan di bawah Garis kemiskinan. Demikian juga halnya pada tahun 2018, dengan garis kemiskinan sebesar Rp.426.469,- terdapat

sekitar 16,64 ribu orang (10,27%) yang memiliki pengeluaran/pendapatan di bawah Garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan yang cukup besar dari penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi yaitu sekitar 2,42 ribu orang pada periode 2017-2018. Begitu juga halnya pada 2019 terdapat garis kemiskinan yang menurun menjadi yakni Rp. 460.533,- atau sekitar 16,30 ribu orang (9,94%) yang memiliki pengeluaran/pendapatan di bawah garis kemiskinan

Tabel 7.7 Garis Kemiskinan Kota Tebing Tinggi 2015-2020

Kemiskinan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Garis Kemiskinan (Rp/kap/bln)	355.621	383.650	415.307	426.469	460.533
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	18,80	18,52	19,06	16,64	16,30
Persentase Penduduk Miskin	12,03	11,70	11,90	10,27	9,94

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Salah satu faktor dominan yang sering dijadikan tolok ukur adalah tinggi rendahnya tingkat inflasi di suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga pola konsumsinya akan lebih rendah dari garis kemiskinan. Sebaliknya tingkat inflasi yang terjaga baik akan dapat mendorong pola konsumsi masyarakat menjadi lebih baik disebabkan daya belinya cukup stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

7.4.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pergeseran pola pengeluaran dari makanan ke non makanan terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya

tinggi. Keadaan ini terlihat jelas pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanan sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, ditabung, ataupun investasi.

Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat, di mana distribusinya merupakan distribusi pendapatan masyarakat yang dapat dijadikan petunjuk tingkat pemerataan pendapatan masyarakat.

Tabel 7.8 Pola Konsumsi Masyarakat Kota Tebing Tinggi 2015-2019

Kemiskinan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Makanan	48,80	53,11	57,21	49,97	48,04
Non Makanan	51,20	46,89	42,79	50,03	51,96

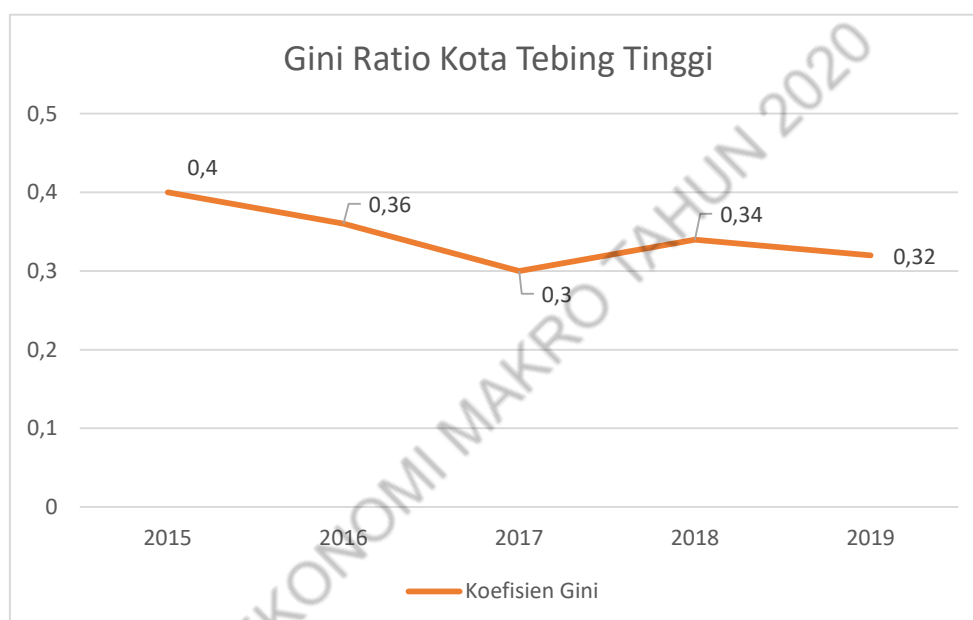
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 proporsi konsumsi masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk non makanan masih lebih besar proporsinya dibandingkan dengan konsumsi makanan. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendapatan sebagian besar masyarakat cenderung meningkat sehingga terjadi pergeseran pola konsumsi dari makanan ke non makanan. Hanya saja pada periode 2016-2017 pola konsumsi makanan kembali menjadi lebih besar dari konsumsi non makanan diikuti dengan penurunan persentase pengeluaran non makanan pada tahun sebelumnya. Sebaliknya pada tahun 2018 tingkat pendapatan masyarakat mulai membaik kembali dengan terlihatnya pola persentase pengeluaran konsumsi non makanan yang semakin meningkat dibandingkan proporsi pengeluaran untuk makanan

7.4.2 Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan pada pengeluaran penduduk yang ada di Kota Tebing Tinggi, maka ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di Kota Tebing Tinggi dihitung dengan pendekatan Koefisien Gini dengan kriteria

- Ketimpangan “rendah” bila angka Gini kurang dari 0,3;
- Ketimpangan “sedang” bila indeks Gini antara 0,3-0,4;
- dan Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4.

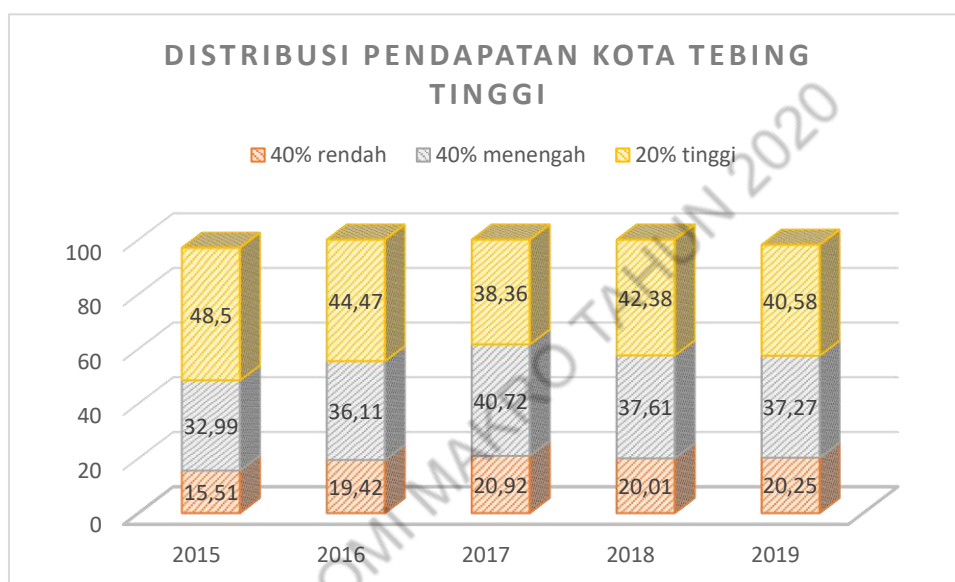


Gambar 7.5 Nilai Koefisien Gini Kota Tebing Tinggi 2015-2019

Menurut Kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2015-2019 tergolong relatif rendah (low inequality). Kriteria *relative inequality* adalah sebagai berikut:

- *High inequality* (distribusi pendapatan sangat pincang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.

- *Moderate inequality* (kepingcangan dianggap sedang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau GNP.
- *Low inequality* (distribusi pendapatan tidak terlalu pincang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.



Gambar 7.6 Kriteria Bank Dunia (Relative Inequality) Kota Tebing Tinggi 2015-2019

Maka dari kriteria tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kelompok 40% dari penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati pendapatan antara 19% sampai 20% dari pendapatan regional yang dihasilkan oleh penduduk Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2016, dari 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah menikmati kenaikan pendapatan regional menjadi 19,42% dari sebelumnya yang hanya mencapai 18,51%, pada tahun 2017, dari 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah kembali mengalami kenaikan angka pendapatan menjadi 20,92% dari pendapatan regional, sebaliknya pada tahun 2018,

pendapatan dari 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah mengalami penurunan menjadi hanya 20,01% dari pendapatan regional.

Secara umum dapat kita lihat pada periode 2015-2019, 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah masih menikmati pendapatan regional sebesar lebih dari 20 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian karena 20% kelompok penduduk berpendapatan tinggi masih dapat menikmati "kue" pendapatan regional lebih dari 40 persen. Begitu juga pada tahun 2019 20% kelompok berpendapatan tinggi juga masih menikmati 40 persen dari pendapatan regional tebing tinggi.

7.5 Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Sektor Kota Tebing Tinggi Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Walaupun Kota Tebing Tinggi merupakan kota kecil yang hanya memiliki 5 (lima) kecamatan, dengan luas wilayah 38,438 km² dan jumlah penduduk 164.402 jiwa, tetapi Kota Tebing Tinggi memperlihatkan kinerja baik sesuai dengan peran kota sebagai pusat pelayanan jasa. Sektor listrik, gas dan air bersih, akomodasi makan minum serta keuangan dan jasa yang lebih tinggi dan yang paling dominan dibanding Provinsi Sumatera Utara, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan perkotaan Kota Tebing Tinggi cenderung meningkat ke arah perkembangan dominasi sektor-sektor perkotaan, sebagai pusat pelayanan jasa.

Begitu juga halnya mengenai lebih dominannya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan bahwa tingkat produktivitas dan konsumsi masyarakat Kota Tebing Tinggi lebih besar jika dibandingkan terhadap wilayah acuan di Provinsi Sumatera Utara. Terdapat korelasi kuat dominasi peranan sektor dalam konteks peranan Kota sebagai kota yang telah bergerak maju dari masyarakat yang bersifat tradisional menuju kota dengan masyarakat lepas landas. Perkembangan Kota Tebing

Tinggi menjadi konstelasi Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan Kota Tebing Tinggi merupakan kota yang terbesar perkembangannya setelah Kota Medan dan Kota Pematangsiantar.

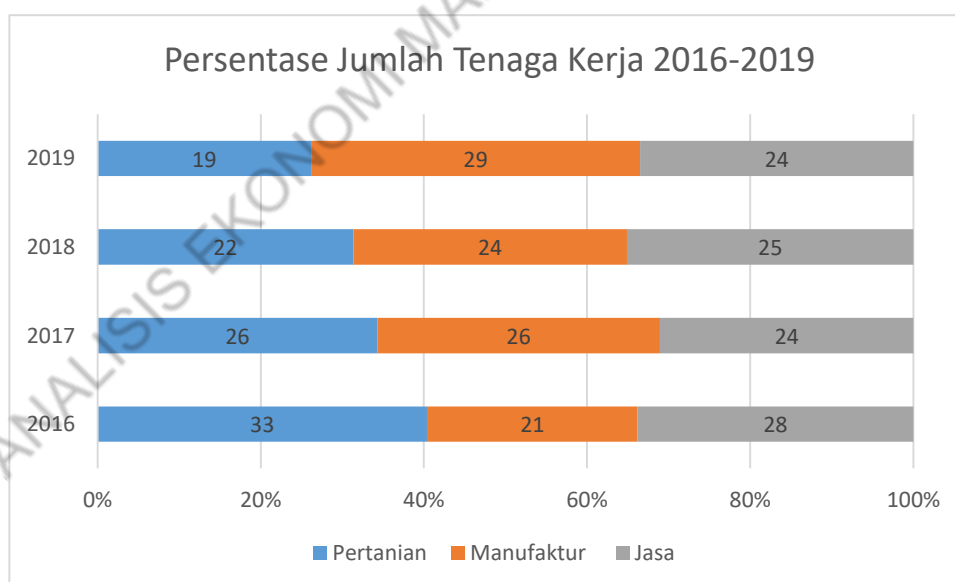
Tabel 7.9 Sektor Basis Yang Dapat dikembangkan Kota Tebing Tinggi

Kategori Lapangan Usaha	LQ Kota Tebing Tinggi					
	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata LQ
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,1
Pertambangan dan Penggalian	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,1
Industri Pengolahan	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,7
Pengadaan Listrik dan Gas	1,47	1,45	1,39	1,40	1,40	1,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,50	2,52	2,52	2,53	2,48	2,5
Konstruksi	1,18	1,19	1,19	1,19	1,18	1,2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,19	1,23	1,26	1,29	1,32	1,3
Transportasi dan Pergudangan	1,74	1,73	1,73	1,71	1,70	1,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,99	1,96	1,93	1,90	1,86	1,9
Informasi dan Komunikasi	1,02	1,00	0,98	0,95	0,92	1,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	1,65	1,64	1,65	1,64	1,7
Real Estat	2,03	2,01	1,96	1,93	1,89	2,0
Jasa Perusahaan	0,55	0,53	0,51	0,48	0,46	0,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,34	3,31	3,26	3,20	3,07	3,2
Jasa Pendidikan	3,12	3,09	3,05	3,02	3,02	3,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,25	1,25	1,27	1,27	1,3
Jasa lainnya	2,19	2,13	2,05	1,99	1,94	2,1

Sumber: Hasil Analisis, 2020

7.6 Ketenagakerjaan

Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor seperti pertanian, manufaktur dan jasa. Tiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Laju pertumbuhan yang berbeda tersebut mengakibatkan dua hal. *Pertama*, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. *Kedua*, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pendapatan Kota Tebing Tinggi itu sendiri maupun Provinsi Sumatera Utara. Perbedaan laju pertumbuhan pendapatan regional dan kesempatan kerja tersebut, juga menunjukkan perbedaan elastisitas masing-masing sektor untuk penyerapan tenaga kerja.



Gambar 7.7 Perkembangan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa persentase tenaga kerja yang paling banyak adalah yang bekerja pada sektor jasa sebesar 28%, hal

ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2019 ada sekitar 55.269 orang yang bekerja pada sektor jasa dari total 86.169 jiwa angkatan kerja.

Tabel 7.10 Jumlah Angkatan Kerja Per Sektor

Tahun	Pertanian	Manufaktur	Jasa
2016	7.959	13.260	64.277
2017	6.280	16.547	54.896
2018	5.324	14.853	57.546
2019	4.477	17.985	55.269

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Secara keseluruhan total angka angkatan kerja naik, namun kenaikan jumlah angkatan kerja juga linear dengan kenaikan angka pengangguran terbuka yang naik 1% dari tahun 2018 ke tahun 2019

Tabel 7.11 Perbandingan Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tahun	Angkatan Kerja (Jiwa)	Pengangguran Terbuka (Jiwa)	Total (Jiwa)	Perbandingan Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka (%)
2016	70.362	7.361	77.723	10,46
2017	73.227	7.122	80.349	9,73
2018	80.439	5.815	86.254	7,23
2019	79.338	6.831	86.169	8,61

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Bergeraknya aktivitas perekonomian di berbagai sektor di Kota Tebing Tinggi harus juga diikuti oleh kemampuan dari masing-masing sektor untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia di Kota Tebing Tinggi. Koefisien elastisitas pada sektor manufaktur sebesar 2,74 (sektor industri

pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah dan daur ulang, serta sektor konstruksi). Angka koefisien ini adalah cukup besar, yang berarti apabila terjadi peningkatan 10 persen PDRB berarti akan terjadi peningkatan 2,74 penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur, PDRB dari sektor manufaktur ini adalah PDRB terbesar kedua di Kota Tebing Tinggi dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,38 persen (rata-rata laju pertumbuhan dari tahun 2015-2019) dan share sektor industri pengolahan yang cukup besar terhadap PDRB yakni 12,26 persen

Tabel 7.12 Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral Kota Tebing Tinggi

Sektor	Pertumbuhan/Tahun		Elastisitas
	Tenaga Kerja	PDRB	
Pertanian	-0,17	3,96	-0,04
Manufaktur	12,00	4,38	2,74
Jasa	-5,00	4,64	-1,08

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Sedangkan sektor pertanian memiliki koefisien -0,17 persen, yang artinya apabila terjadi peningkatan 10 persen PDRB akan terjadi penurunan -0,17 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, hal ini dikarenakan kondisi share sektor pertanian yang menurun dari tahun ke tahun yakni hanya 1,25 persen. Untuk sektor jasa koefisien elastisitas sebesar -1,08, walaupun secara data mayoritas pekerja Kota Tebing Tinggi bekerja pada sektor jasa, namun belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal. Kondisi ini dapat disebabkan karena berbagai hal antara lain adanya peningkatan efisiensi dari berbagai perusahaan dalam proses produksi dalam hal penggunaan input tenaga kerja sehingga perusahaan tidak membutuhkan tenaga kerja baru atau kebutuhan akan tenaga kerja baru sangat sedikit, atau bisa saja adanya ketidaksesuaian kualifikasi yang dibutuhkan, dengan kualifikasi yang ditawarkan oleh pasar tenaga kerja,

yang memungkinkan perusahaan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari daerah lain di luar Kota Tebing.

7.7 Perbandingan Analisis Kinerja Ekonomi Makro Dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2017-2022

Adapun indikator dari analisis kinerja ekonomi makro sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 51 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Capaian target pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi adalah 5,14% pada tahun 2021
2. PDRB Perkapita adalah 38 juta rupiah
3. Inflasi adalah sebesar 2%
4. Investasi sebesar 282,945
5. Angka Harapan Hidup 71,23%
6. Angka Kemiskinan 10,05%
7. Tingkat pengangguran terbuka 6%

Dari hasil analisis data dari dokumen analisis ekonomi makro Kota Tebing Tinggi dapat diketahui bahwa keseluruhan ekonomi makro Kota Tebing Tinggi telah tercapai, untuk lebih jelas dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 7.13 Perbandingan Kinerja Ekonomi Kota Tebing Tinggi dan Hasil Analisis hingga Tahun 2021

Indikator	Target Sesuai dengan Kinerja Ekonomi Kota	Hasil Analisis	Capaian
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,15	Telah tercapai

PDRB Perkapita (juta rupiah)	38	39,54	Telah tercapai
Inflasi (%)	2	1,54	Telah tercapai
Angka Harapan Hidup (%)	71,23	75,08	Telah tercapai
Angka Kemiskinan (%)	10,05	9,94	Telah tercapai
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6	8,60	Telah tercapai
Investasi (Milyar Rupiah)	237,554	2.089.090.653.158	Telah tercapai

Sumber: Hasil Analisis, 2020

7.8 Perkiraan Investasi Daerah

Berdasarkan lapangan usaha pada periode 2014-2018 terdapat 4 (empat) lapangan usaha yang menyerap investasi di atas 10 persen dari total investasi yang ditanamkan di Kota Tebing Tinggi yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Mobil dan Sepeda Motor menyerap investasi sebesar 22,84 persen, Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 15,00 persen, Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 12,89 persen, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,23 persen, dan sisanya kurang dari 50 persen diserap oleh lapangan usaha lainnya yang ada di Kota Tebing Tinggi.

Jika dirinci berdasarkan kelompok industri, terlihat bahwa hampir 80 persen investasi di lapangan usaha industri pengolahan diserap oleh Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik. Selain itu sebesar 16,29 persen investasi industri juga diserap oleh Industri Makanan dan Minuman, sedangkan sisanya oleh industri pengolahan lainnya dengan persentase

kurang dari 5 persen. Dengan adanya gambaran mengenai penyerapan investasi menurut lapangan usaha dan menurut kelompok industri diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi guna mengevaluasi kebijakan investasi serta perencanaannya di masa yang akan datang.

Investasi dalam kegiatan ekonomi mempunyai arti yang luas. Investasi selalu dikaitkan dengan kegiatan menanamkan uang atau modal dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan kapasitas produksi pada masa yang akan datang. Sebagai contoh menambah kapasitas produksi dengan membeli mesin dan peralatan, meningkatkan kualitas sistem produksi, dan sebagainya. Dalam menganalisis perkiraan investasi daerah maka dapat dianalisis dengan menggunakan analisis ICOR.

Tabel 7.14 Perkembangan Nilai Investasi Kota Tebing Tinggi 2015-2019

Tahun	Harga Berlaku 2010			Harga Konstan 2010		
	PMTB	Δ Inventori	Jumlah	PMTB	Δ Inventori	Jumlah
2015	1.368,83	41,83	1.410,66	844,75	47,29	892,04
2016	1.488,06	41,73	1.529,79	882,95	39,55	922,50
2017	1.594,58	42,93	1.637,51	929,25	28,50	957,75
2018	1.819,10	61,35	1.880,45	1.009,44	35,91	1.045,35
2019	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Kota Tebing Tinggi dalam Angka, 2019

Nilai investasi yang di tanamkan di Kota Tebing Tinggi selama 2014-2018 atas dasar harga konstan 2010 dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan yang cukup besar. Nilai investasi yang ditanamkan pada awal tahun 2014 sebesar 848,52 milyar rupiah, naik menjadi 892,04 milyar rupiah di tahun 2015 kemudian naik lagi menjadi 922,50 milyar rupiah pada tahun 2016. Pada tahun 2017 investasi mengalami kenaikan kembali

menjadi sebesar 957,75 milyar rupiah kemudian menaik lagi pada tahun 2018 menjadi 1.045,35 milyar rupiah. Sementara itu, besarnya porsi investasi dibandingkan dengan besarnya PDRB selama periode 2014-2018 berkisar antara 26-28 persen. Persentase investasi terkecil terjadi pada tahun 2017 ini yaitu sebesar 26,79 persen, sedangkan persentase investasi yang terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 27,80 persen.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi fisik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, yang dicerminkan oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga cenderung mengalami peningkatan selama periode 2014-2018. Secara umum pertumbuhan PMTB selama periode tersebut rata-rata sebesar 5,29 persen. Adapun pertumbuhan investasi terendah tercatat pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,41 persen dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 9,15 persen.

7.8.1 Koefisien ICOR Total

Perkiraan investasi daerah di Kota Tebing Tinggi 2019-2024 dengan menggunakan metode *trendline* (regresi linier) mengalami kenaikan secara data statistik yang diperoleh. Diperkirakan sampai dengan tahun 2024 akan ada nilai investasi sebesar Rp. 2.459.895,28

Tabel 7.15 Perkiraan Investasi Daerah (PMTB) Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Tahun	Perkiraan Investasi Nominal (Juta Rupiah)
2019	1.842.545,94
2020	1.966.015,75
2021	2.089.485,57
2022	2.212.955,38
2023	2.336.425,19

Tahun	Perkiraan Investasi Nominal (Juta Rupiah)
2024	2.459.895,28

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Hal ini hanya sebatas deskripsi dan proyeksi investasi ke depannya di Kota Tebing Tinggi, namun untuk menganalisis investasi suatu daerah/kota diperlukan analisis lanjutan yakni analisis ICOR. ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapasitas (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output. Koefisien ICOR Kota Tebing Tinggi tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.16 Koefisien ICOR Kota Tebing Tinggi 2015-2020

ICOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendekatan Investasi	5,90	5,58	5,48	5,65	5,31	5,14

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Tabel 7.16 menunjukkan rata-rata ICOR Kota Tebing Tinggi pada periode 2015-2020 bernilai di atas 5, ini berarti bahwa kegiatan investasi di Kota Tebing Tinggi cenderung kurang efisien. Secara umum bahwa angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4.

Jika dilihat lebih rinci ICOR Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan pada tahun 2015 mencapai 5,90 kemudian mulai mengecil pada tahun 2016 dan 2017 hingga mencapai angka 5,48, dan diproyeksikan menjadi 5,14 pada tahun 2020, secara rata-rata dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh tambahan output lapangan usaha sebesar 1 (satu) unit diperlukan tambahan investasi sebesar 5,51 unit.

Sebagai ilustrasi, jika koefisien ICOR diketahui sebesar 5 artinya, untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 5 unit, jika output pada tahun sebelumnya sebesar Rp 1,8 miliar, maka agar output

pada tahun yang akan datang untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 10%, atau bertambah sebesar Rp. 0,18, dibutuhkan investasi sebesar: $5 \times \text{Rp } 0,18 \text{ miliar} = \text{Rp. } 0,9 \text{ miliar}$ (Rp. 900.000.000).

Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa nilai ICOR Kota Tebing Tinggi di atas 5, ini berarti bahwa kegiatan investasi di Kota Tebing Tinggi cenderung kurang efisien. Pada dasarnya Kota Tebing Tinggi memiliki nilai investasi yang cukup rendah untuk ke depannya, hal ini bisa saja terjadi karena telah terselesaikannya Kuala Tanjung dan Ruas Jalan Tol Medan Tebing Tinggi yang menjadi faktor mendorong perlambatan investasi lebih lanjut. Namun meskipun demikian, harapan ke depannya investasi proyek infrastruktur yang masih terus berjalan diharapkan masih dapat menopang pertumbuhan investasi di Kota Tebing tinggi, seperti Tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung-Parapat

Hasil analisis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta hanya disebabkan oleh investasi yang ditanamkan saja, akan tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti tenaga kerja serta kemajuan teknologi, faktor selanjutnya yang paling penting adalah kepastian ekonomi nasional, investasi secara nasional terjadi perlambatan yang akan dipengaruhi oleh Covid 19, hal ini tentu terjadi karena pelaku usaha asing memerlukan kepastian yang lebih tinggi untuk melakukan investasi.

7.9 Analisis Kinerja Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi Terhadap Pandemi Covid-19

Walaupun analisis ini tidak menganalisis mengenai terjadinya dampak Covid-19 terhadap perekonomian, namun pandemi Covid-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik regional daerah, seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan serta ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi pada sektor kecil seperti UMKM dan sektor informal lainnya

Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi.

Kebijakan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Banyak kreditur yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan hutang dan kredit kepada bank.

Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit. Untuk itu beberapa solusi yang dapat dikerjakan oleh *stakeholder* pemerintah daerah di antaranya adalah dengan mempertahankan sektor kecil dan menengah seperti industri kecil

UMKM mengingat tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di Kota Tebing Tinggi cukup tinggi, adapun solusinya sebagai berikut:

1. Menghubungkan para pelaku UKM dengan toko-toko teknologi daring untuk membantu pemasaran dan penjualan produk-produk UKM seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli
2. Melakukan kerja sama dengan industri lokal penyedia bahan baku mentah untuk keperluan produksi UKM
3. Melakukan kebijakan-kebijakan jangka pendek bagi UMKM yakni pengenalan teknologi digital dan pelatihan bagi para pelaku dan pekerja UMKM
4. Melakukan kebijakan jangka panjang bagi UMKM untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi untuk proses produksi, penggunaan media teknologi digital untuk mempromosikan produk UMKM, dan menemukan pasar potensial bagi produk yang dihasilkan
5. Dalam jangka pendek, perlu adanya pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan media e-commerce (belanja daring) untuk menjual produk-produk
6. Pelibatan dunia akademisi dan usaha besar dalam pendampingan pengenalan dan penggunaan teknologi produksi dan media digital

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan

Demikianlah Laporan Akhir Kegiatan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan menampilkan kondisi ekonomi daerah yang memuat kondisi Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil Kegiatan Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2020 ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi yang direpresentasikan dari pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu tahun 2015–2019 mempunyai *pattern* (pola) tumbuh positif tidak berbeda jauh dengan Provinsi Sumatera Utara. Sektor atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor dengan kontribusi

terbesar, sebesar 23,72 persen, kemudian disusul Konstruksi dengan kontribusi sebesar 14,94 persen, Industri Pengolahan sebesar 12,26 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,33 persen.

2. Berdasarkan proyeksi *estimate* pertumbuhan ekonomi lebih mengarah kepada *under estimate* yang akan berada di angka 1,54% saja sampai dengan tahun 2025. Dikarenakan adanya dampak ekonomi akibat Covid-19
3. Berdasarkan proyeksi dan dengan mempertimbangkan perkembangan harga serta determinan (faktor) utama inflasi di Sumatera Utara, Pematangsiantar, dan Medan serta Tebing Tinggi, maka diperkirakan inflasi tahunan akhir tahun ini ada pada cabai merah, minyak goreng, sewa rumah, rokok putih, dan bawang merah
4. Berdasarkan koefisien ICOR diketahui sebesar 5. Artinya, untuk meningkatkan output satu unit pada pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi sebesar 5 unit, namun nilai ICOR Kota Tebing Tinggi di atas 5, ini berarti bahwa kegiatan investasi di Kota Tebing Tinggi cenderung kurang efisien.
5. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Gini Ratio diketahui bahwa disparitas Kota Tebing Tinggi masih *low inequality* artinya distribusi pendapatan tidak terlalu pincang, dikarenakan 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari bagian pendapatan regional
6. Koefisien elastisitas tenaga kerja pada sektor manufaktur sebesar 2,74, sektor pertanian memiliki koefisien elastisitas sebesar -0,17 persen, dan elastisitas sektor jasa memiliki koefisien elastisitas sebesar -1,08. Maka sektor manufaktur masih dianggap dapat menyerap tenaga kerja lebih besar daripada sektor lainnya.

8.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dirumuskan saran dan rekomendasi terkait dengan kajian analisis ekonomi makro ini sebagaimana berikut;

1. Besarnya kontribusi sektor atau lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu tahun 2015 – 2019 yaitu lapangan usaha *Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan*, maka Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu memperhatikan dan mendukung ketiga sektor ini khususnya terkait dengan kemudahan usaha, perizinan, dan promosi. Peningkatan peranan lapangan usaha ini sangat baik dalam memacu perekonomian karena lapangan usaha ini merupakan penggerak untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah Tebing Tinggi.
2. Dalam menjaga kelancaran distribusi pengendalian inflasi sebaiknya TPID mempercepat kerja sama perdagangan antar daerah. Pengembangannya diarahkan untuk membangun model bisnis kerja sama serta mengoptimalkan peran BUMD dan swasta, TPID juga diharapkan terus meningkatkan infrastruktur perdagangan seperti pasar induk dan sarana konektivitas di Kota Tebing Tinggi, melakukan program unggulan pertanian di antaranya kluster bawang merah, TPID juga diharapkan akan bekerja sama untuk mengembangkan kluster perikanan, bawang merah, dan cabai merah yang dapat berkontribusi dalam pengendalian inflasi serta tetap melakukan pelaksanaan Pasar Murah, Beras Madani, Dispensasi Angkutan Bahan Pokok memasuki inti kota secara gratis yang tetap memperhatikan protokoler kesehatan
3. Untuk mempertahankan konsumsi dan daya beli masyarakat Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi sebaiknya lebih memperhatikan sektor ekonomi informal, seperti UMKM sebagai peredam terus berlanjutnya

peningkatan angka pengangguran dengan memberdayakan pekerja berketerampilan rendah melalui pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kemampuan UMKM

ANALISIS EKONOMI MAKRO TAHUN 2020

